

**ANALISIS PENGGUNAAN HAK PILIH MASYARAKAT PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN 2017**

(Studi Pada Kelurahan Pringsewu Timur dan Pekon Pardasuka)

(Skripsi)

Oleh:

ARDI YANTO



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

ANALYSIS OF RIGHT ELECTION USE IN SELECTING THE REGIONAL HEAD IN PRINGSEWU REGENCY 2017

(STUDY IN PRINGSEWU TIMUR AND PARDASUKA)

BY

ARDI YANTO

Pringsewu regency is one of regions which conducted simultaneous elections on february 15, 2017. The elections were followed by 3 candidad pairs namely; 1) Ardian Saputra-Dewi Arimbi 2)Sujadi Jaddat-Fauzi, and 3)Siti Rahma-Edi Agus Yanto with participation inhabitants level was 68,66%. The participation level did not reach the national target which set by KPU and Bappenas was 75.50%. In Lampung Province, Pringsewu elections was the second lowest participation level after Tulang Bawang Regency with participation level was 66.31%. The aim of this study was to find out the obstacles factor of right elections use in Pringsewu elections especially in Pringsewu Timur with participation level was 58% and the participation level in Pardasuka was 44%. The research method was descriptive qualitative with voting informants who voted, voters who did not vote, community leaders, KPPS, and KPU Pringsewu Regency. The researcher used interview and documentation in collecting the data. The results of this research found that the obstacles factors were caused by internal and external factors; internal factors were 1) Technical, like being out of the area for work and school, 2). Occupation, the existence of inhabitants that work outside the area on the day of voting. External factors; 1). Administrative, obtaining TPS away from residence and still registered inhabitants who are no longer a citizen of the local community, 2). Politics is the low trust of the public, apathy and cynicism.

Keywords: Right Election Use, Pringsewu Election

ABSTRAK

ANALISIS PENGGUNAAN HAK PILIH MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 (Studi Pada Kelurahan Pringsewu Timur dan Pekon Pardasuka)

Oleh

ARDI YANTO

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu daerah yang melaksanakan pilkada serentak pada 15 Februari 2017. Pilkada Tersebut diikuti oleh 3 pasangan calon yaitu; 1). Ardian Saputra-Dewi Arimbi, 2). Sujadi Saddat-Fauzi, dan 3). Siti Rahma-Edi Agus Yanto dengan tingkat partisipasi masyarakat 68.66%. Tingkat partisipasi tersebut tidak mencapai target nasional yang ditetapkan KPU dan Bappenas sebesar 75.50%. Di Provinsi Lampung, pilkada Kabupaten Pringsewu merupakan pilkada dengan tingkat partisipasi terendah ke dua setelah Kabupaten Tulang Bawang dengan tingkat partisipasi sebesar 66.31%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor hambatan penggunaan hak pilih masyarakat pada Pilkada Pringsewu khususnya di Kelurahan Pringsewu Timur dengan partisipasi sebesar 58% dan Pekon Pardasuka dengan partisipasi sebesar 44%. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan informan pemilih yang memilih, pemilih yang tidak memilih, tokoh masyarakat, KPPS, dan KPU Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor hambatan penggunaan hak pilih masyarakat di Kelurahan Pringsewu Timur dan Pekon Pardasuka adalah karena Faktor internal yaitu; 1). Teknis, seperti sedang berada diluar daerah untuk bekerja dan sekolah, 2). Pekerjaan, adanya masyarakat yang bekerja diluar daerah pada saat hari pemungutan suara. Faktor eksternal; 1). Administratif, mendapatkan TPS yang jauh dari tempat tinggal dan masih terdaftarnya masyarakat yang bukan lagi menjadi warga masyarakat setempat, 2). Politik yaitu rendahnya kepercayaan terhadap publik, apatis dan sinisme.

Kata Kunci: Pengguna Hak Pilih, Pilkada Pringsewu

**ANALISIS PENGGUNAAN HAK PILIH MASYARAKAT PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN 2017**

(Studi Pada Kelurahan Pringsewu Timur dan Pekon Pardasuka)

Oleh

ARDI YANTO

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGGUNAAN HAK PILIH MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 (Studi Pada Kelurahan Pringsewu Timur dan Pekon Pardasuka)**

Nama Mahasiswa : *Ardi Yanto*

No. Pokok Mahasiswa : 1346021005

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



[Signature]

Dr. Suwondo, M.A
NIP. 19590903 198503 1 002

[Signature]

Drs. Budi Harjo, M.IP
NIP. 196800112 19802 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


[Signature]

Drs. R Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP. 19611218 198902 1 001

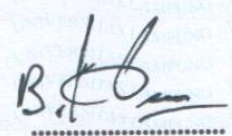
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Suwondo, M.A



Sekretaris : Drs. Budi Harjo, M.IP



Penguji Utama : Drs. R Sigit Krisbintoro, M.IP



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Swarief Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Desember 2017

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Desember 2017
Yang Membuat Pernyataan,



Ardi Yanto
NPM. 1346021005

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Krui, Kabupaten Pesisir Barat Pada tanggal 17 Desember 1996, anak ketiga dari tiga bersaudara, buah cinta dari Bapak Murtijan dan Ibu Rohayi.

Jenjang akademik Penulis dimulai dengan Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Marang, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat pada 2010, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pesisir Selatan pada tahun 2013.

Tahun 2013, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur mandiri (paralel) dan Lulus pada tahun 2017.

MOTTO

Berdo'a tanpa beramal sama halnya seperti pemanah tanpa busur

(Sayyidina Ali bin Abi Thalib)

**Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah
menciptakannya**

(Peter Drucker)

**Mulailah dari diri sendiri, Mulailah dari yang terkecil, dan
mulailah dari sekarang juga.**

(Ardi Yanto)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya kecil ini kepada:

Bapakku tercinta Murtijan, Ibuku wanita terhebat yang aku sayangi Rohayi, sebagai tanda terima kasih dan baktiku, karena kalian aku belajar bertahan dan berjuang dalam hibup dan mungkin aku tidak akan seperti sekarang ini kalau tidak karena kalian Bapak-ibuku.

Yayuk Sairoh dan Kakang Saipul serta seluruh keluarga besar Almarhum Mbah Boimin dan Mbok Ngatirah serta Kakik Minarjo dan Ninik Mursiti tercinta yang selalu mendukungku.

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “**Analisis Penggunaan Hak Pilih Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 (Studi Pada Kelurahan Pringsewu Timur dan Pekon Pardasuka)**” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai akibat dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis. Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Allah SWT. Atas segala kebesaran, kuasa, serta kesehatan dan petunjuk yang selalu Engkau berikan. Nabi Muhammad SAW. atas risalah dan cahaya kebenaran sejati yang disampaikan kepada kami.
2. Kedua orang tuaku, Bapak Murtijan dan Ibu Rohayi, terima kasih atas segala kesabaran, dukungan, nasehat, perjuangan dan do'a yang tiada henti untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk segala kasih sayang yang terus diberikan kepada penulis sejak lahir hingga saat ini dan seterusnya, semoga Bapak dan Ibuku selalu dalam lindungan Allah Swt.

Terimakasih atas segalanya semoga anakmu ini bisa menjadi ujung tombak perjuangan dan kebahagiaan kalian berdua dunia akhirat.

3. Yayukku Sairoh, dan Kakangku Saipul. Terimakasih atas segala bantuan dan do'a, motivasi serta dukungan yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebahagiaan selalu dilimpahkan untuk kita.
4. Keluarga Besar Penulis, Keluarga Mbah Boimin (Alm) dan Mbok Ngatirah serta Kakik Minarjo dan Ninik Mursiti. Terima kasih atas segala semangat dan dukungan, serta do'a yang selalu diberikan kepada penulis selama ini. Semoga kebahagiaan selalu dilimpahkan untuk kita.
5. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Sekaligus Dosen Pembahas dan Penguji.
7. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H. selaku Pembimbing Akademik
8. Bapak Dr. Suwondo, M.A selaku Pembimbing Utama dan Bapak Drs. Budi Harjo, M.I.P selaku Pembimbing Kedua yang telah sabar membimbing dan memberikan saran demi terciptanya skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Staf Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan.

10. Seluruh pihak KPU Kabupaten Pringsewu, Kelurahan Pringsewu Timur, dan Pekon Pardasuka Kabupaten Pringsewu yang telah memberikan izin penelitian serta bersedia memberikan banyak data dalam proses penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta saya ucapkan terimakasih kepada masyarakat Kelurahan Pringsewu Timur dan Pekon Pardasuka yang menerima dengan sangat baik kehadiran saya dalam melakukan penelitian.
11. Abang Edo Andrian, S.Pd., Seseorang yang sudah saya anggap menjadi bagian dari keluarga, salah seorang yang berpengaruh dalam hidup saya sebelum saya bertemu dengan orang-orang besar. Terimakasih bang, tanpa semangat dan dukungan abang saya belum tentu sampai sejauh ini, semoga Allah selalu melindungimu.
12. Kakanda Ricky Ardian, S.I.P., M.I.P, Sosok inspiratif yang tak henti membimbing dan memotivasi saya dalam segala hal. Seseorang yang sudah saya anggap menjadi keluarga saya. Terimakasih kanda, semoga kebaikanmu dibalas Allah SWT.
13. Sahabat dan Saudara seperjuangan Lusita Anjelina, S.I.P., Terimakasih selalu memberikan Do'a dan semangat selama kuliah sampai saat ini. Allah mempertemukan kita bukan tanpa alasan. Semoga tetap menjadi sahabat dan saudara selamanya.
14. Sahabat-sahabatku yang berjuang nan jauh disana, Praha Gala Saputra, Amd.Kep., Agus Andika Putra, S.I.P., dr. Aryani Diningrum, Fera Endriana, Amd.Keb., Punggawa Sela FC (Capt. Rovi Wahyudi, Muhammad Yannuar Rianto, Amd.Kep., Maulana Yusuf, S.Kom., Risky Rohmanda, Ade

Febrianto, dll). Suatu hari nanti kita akan mengulang kejayaan di masa itu dengan bentuk yang berbeda!

15. Sahabat sekaligus saudara sepenanggungan jua yang selalu ada: Ahmad Irfan, S.I.P., Yogi Noviantama, S.I.P., Danang Marhaens, S.I.P., Tri Hendra, S.I.P., Nurkalim, S.I.P., Iqbal Nugraha, S.I.P., Restu Aditya Putra, S.I.P., Rizko Afitrian Yahya, S.I.P., Indra Bangsawan, S.I.P., Danni Pangaribowo, S.I.P., Yones Sepriansyah, S.I.P., Agung Aditya Pratama, S.I.P., Rahma Adi Putra, S.I.P., Vivi Alvionita, S.I.P., Restiani Damayanti, S.I.P., Kenn Sindy Kirana Julia, S.I.P., Fina Ria Tisa, S.I.P., Winda Dwi Astuti Herman, S.I.P., M.I.P., terimakasih kebersamaanya, kekonyolanya, terima kasih telah mendengarkan keluh kesahku, mendukung dan selalu memberi semangat dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung dan membuat perjalanan kehidupan lebih berwarna.
16. Teman sekelompok KKN Pekon Lok Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat Devolta Diningrat, S.H., Risky Hendarji Putra, S.I.P., Imam S. Dermawan, S.P., Ista Mayasari, S.P., Nurhafifah Zultha, S.A.P, Indah Permatasari, S.E. Terimakasih telah membuat 60 Hari selama KKN penuh dengan Bahagia, duka dan sukacita.
17. Keluarga Besar Universitas Lampung yang telah membantu saya selama proses perkuliahan di Universitas Lampung.
18. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua yang membutuhkan terutama bagi penulis. Tiada gading yang tak retak maka saran dan kritik yang bersifat membangun Penulis harapkan dan akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas segala jasa dan budi baiknya serta melindungi dan meridhoi kita bersama. Aamiin.

Bandar Lampung, 22 Desember 2017
Penulis,

Ardi Yanto

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

I. PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 14 |
| C. Tujuan Penelitian | 14 |
| D. Manfaat Penelitian | 15 |

II. TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Konsep Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) | 16 |
| B. Konsep Partisipasi Politik | 18 |
| 1. Sifat Partisipasi Politik | 19 |
| 2. Tipologi Partisipasi Politik | 21 |
| 3. Partisipan Politik..... | 25 |
| C. Penyebab Tidak Memilih Pada Pilkada | 27 |
| D. Partisipasi Politik Masyarakat Desa | 40 |
| E. Partisipasi Politik Masyarakat Kota/kelurahan..... | 41 |
| F. Kerangka Pikir Penelitian | 43 |

III. METODE PENELITIAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Tipe Penelitian | 50 |
| B. Fokus Penelitian..... | 51 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 54 |
| D. Informan..... | 54 |
| E. Jenis Data..... | 55 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 56 |
| G. Teknik Pengolahan Data..... | 58 |
| H. Teknik Keabsahan Data | 60 |

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

| | |
|------------------------------------|----|
| A. Kabupaten Pringsewu | 61 |
| B. Kelurahan Pringsewu Timur | 63 |
| C. Pekon Pardasuka | 68 |

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 | 73 |
| B. Faktor Hambatan Penggunaan Hak Pilih Masyarakat di Kelurahan Pringsewu Timur | 76 |
| C. Faktor Hambatan Penggunaan Hak Pilih Masyarakat di Pekon Pardasuka | 99 |

VI. SIMPULAN DAN SARAN

| | |
|-------------------|-----|
| A. Simpulan | 120 |
| B. Saran | 121 |

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Halaman

| | | |
|------------|---|-----|
| Tabel 1.1 | Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak di Provinsi Lampung Tahun 2017 | 3 |
| Tabel 1.2 | Pasangan Calon dan Partai Pengusung Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 | 4 |
| Tabel 1.3 | Sebaran Daftar Pemilih Tetap Berdasarkan Kecamatan Pilkada Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 | 5 |
| Tabel 1.4 | Perolehan Hasil Suara Pilkada Kabupaten Pringsewu Tahun 2017..... | 6 |
| Tabel 1.5 | Sebaran Tingkat Pengguna Hak Pilih Berdasarkan Kecamatan Pada Pilkada Kabupaten Pringsewu Tahun 2017..... | 7 |
| Tabel 1.6 | Tingkat Partisipasi Terendah Berdasarkan Pekon Pada Pilkada Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 | 7 |
| Tabel 1.7 | Tingkat Partisipasi Setiap Pekon di Kecamatan Pardasuka Pada Pilkada Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 | 8 |
| Tabel 1.8 | Tingkat Partisipasi Terendah Berdasarkan Kelurahan Pada Pilkada Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 | 9 |
| Tabel 2.1 | Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Tidak Pemilih..... | 34 |
| Tabel 3.1 | Daftar Informan..... | 55 |
| Tabel 4.1 | Nama-nama Lurah..... | 63 |
| Tabel 4.2 | Jumlah Penduduk | 64 |
| Tabel 4.3 | Orbitas dari Kelurahan ke Daerah Lain | 65 |
| Tabel 4.4 | Pengalokasian Lahan..... | 66 |
| Tabel 4.5 | Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan..... | 67 |
| Tabel 4.6 | Rukun Tetangga (RT) | 68 |
| Tabel 4.7 | Nama-nama Kepala Pekon Pardasuka | 69 |
| Tabel 4.8 | Orbitas dari Pekon ke Daerah Lain | 70 |
| Tabel 4.9 | Pengalokasian Lahan..... | 71 |
| Tabel 4.10 | Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan..... | 71 |
| Tabel 5.1 | Triangulasi Data Penelitian | 118 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--------------------------------------|---------|
| Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir | 48 |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dinilai sebagai sarana dan cermin perwujudan kembali hak dasar kedaulatan rakyat dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam melaksanakan rekrutmen pimpinan daerah untuk mewujudkan demokrasi sampai pada tingkat lokal. Secara sederhana, pilkada adalah cara individu warga negara yang mendiami suatu daerah tertentu melakukan kontrak politik dengan orang atau partai politik yang diberi mandat menjalankan sebagian hak kewarganegaraan pemilih. Dengan ikut serta berperan dalam pilkada secara tidak langsung berperan dalam membangun pemerintahan yang demokratis.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menyebutkan bahwa warga yang memiliki hak memilih pada pasal 56 adalah warga yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah, dan harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bagi warga yang tidak terdaftar dapat menggunakan KTP sebagai daftar pemilih tambahan (DPTb). Berdasarkan ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa partisipasi memilih merupakan hak bukan suatu kewajiban. Pada beberapa negara, partisipasi diposisikan sebagai suatu kewajiban, contohnya di Australia, di Indonesia

partisipasi merupakan hak warga negara, baik hak memilih maupun tidak memilih.

Namun demikian, pemerintah melalui KPU terus berupaya dengan berbagai bentuk sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Jika sebelumnya pilkada dilakukan secara tidak serentak, namun pada tahun 2015 pilkada dilakukan secara serentak. Pada sejumlah kesempatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mensosialisasikan target nasional tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak 2015 dan tahun 2017 sebesar 77,5 persen. Pada awalnya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menginginkan 80 persen, tetapi KPU menginginkan 75 persen, sehingga disepakati bersama 77,5 persen secara nasional.

Provinsi Lampung telah melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2015 di delapan kabupaten/kota, yaitu Kota Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Way Kanan, Lampung Timur, Pesawaran dan Kabupaten Pesisir Barat. Pada 15 Februari 2017 yang lalu pilkada langsung secara serentak kembali dilaksanakan di Indonesia, 5 diantaranya berlangsung di Provinsi Lampung lima kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji.

Meskipun sudah berjalan dengan lancar, masih terdapat beberapa aspek yang menjadi bahan evaluasi. Salah satu yang menarik perhatian adalah masalah tingkat partisipasi pemilih. Rata-rata partisipasi pemilih di 5 Kabupaten yang melaksanakan Pilkada 15 Februari 2017 yang lalu hanya mencapai

71,81%. Angka ini tentu belum memenuhi target yang dicanangkan oleh KPU. Sebagaimana yang tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak di Provinsi Lampung Tahun 2017

| No | Nama Kabupaten | Tingkat Partisipasi |
|----|--------------------------------------|---------------------|
| 1 | Lampung Barat | 76.16 % |
| 2 | Mesuji | 76.14 % |
| 3 | Pringsewu | 68.66 % |
| 4 | Tulang Bawang | 66.31 % |
| 5 | Tulang Bawang Barat | 88.99 % |
| | Rata-rata tingkat partisipasi | 71,81%. |

(Sumber: KPU Lampung 2017)

Permasalahan partisipasi memiliki nilai penting dalam pemilihan kepala daerah, hal ini meyangkut legitimasi politik terhadap hasil pilkada. Selain itu, partisipasi juga menjadi indikator evaluasi terhadap kinerja KPU/KPUD khususnya dalam menyelenggarakan pilkada. Perihal mendasar lainnya, partisipasi masyarakat dapat menjadi ukuran evaluatif terhadap kepercayaan masyarakat tentang demokrasi, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Pilkada langsung sebagai kehendak rakyat tidak menemukan relevansinya ketika partisipasi pemilih tidak memenuhi standar minimal partisipasi, termasuk di Provinsi Lampung rata-rata tingkat partisipasinya sebesar 71,81%. Berdasarkan hasil pilkada serentak di Lampung khususnya menunjukkan bahwa capaian tingkat partisipasi mengalami minus - 5,69%.

Berdasarkan tabel sebelumnya menginformasikan bahwa Kabupaten yang memiliki tingkat partisipasi tertinggi yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 88.99 % dan merupakan satu-satunya kabupaten yang melaksanakan pilkada dengan calon tunggal. Sedangkan tingkat partisipasi terendah

terdapat pada Kabupaten Tulang Bawang sebesar 66,31%, diposisi kedua terendah yaitu Kabupaten Pringsewu sebesar 68,66%, dengan demikian tingkat partisipasi pemilih pada pilkada di Lampung belum mencapai target yang dicanangkan oleh KPU. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Pringsewu yang hanya sebesar 68,66%, dengan demikian muncul pertanyaan mengapa partisipasi di daerah ini rendah.

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu Kabupaten yang melaksanakan pilkada pada 15 februari 2017. Kabupaten ini dikenal sebagai kabupaten yang memiliki mayoritas penduduk pendatang termasuk yang paling banyak beretnis Jawa. Pringsewu saat ini telah melaksanakan pilkada yang kedua kalinya, dimana pilkada pertama dilaksanakan pada tahun 2011, dalam pilkada tersebut diikuti oleh 3 pasangan calon yang didukung dari gabungan partai politik, sebagaimana yang tertuang pada tabel berikut:

Tabel 1.2. Pasangan Calon dan Partai Pengusung Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu 2017

| No | Pasangan Calon Kepala | Partai Pengusung Calon |
|----|------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Ardian Saputra – Dewi Arimbi | PDIP, PPP |
| 2 | Sujadi Saddat – Fauzi | Gerindra, Demokrat, Golkar, PKS |
| 3 | Siti Rahma – Edi Agus Yanto | Nasdem, PAN |

(Sumber: KPUD Kabupaten Pringsewu 2017)

Ketiga pasangan calon kepala daerah ini memiliki latarbelakang yang berbeda, dimana calon bupati nomor urut 1 merupakan putra dari mantan bupati lampung utara, Zainal Abidin. Calon bupati nomor urut 2 merupakan calon petahana. Sedangkan calon nomor 3 merupakan calon perempuan satu- satunya pada Pilkada Pringsewu tahun 2017.

Pemilihan kepala daerah tentunya tidak bisa dipisahkan dari partisipasi pemilih, dimana partisipasi tersebut terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Partisipasi pemilih menjadi salah satu syarat suksesnya pemilihan dengan seberapa besar keikutsertaan calon pemilih untuk menggunakan hak suaranya pada hari pencoblosan. Daftar pemilih tetap (DPT) kabupaten Pringsewu sebesar 315.046, seperti yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 1.3. Jumlah Daftar Pemilih Tetap Per Kecamatan Pada Pilkada Kabupaten Pringsewu Tahun 2017

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Pekon | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | |
|-----|-----------------|--------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | L | P | L+P |
| 1 | Adiluwih | 13 | 72 | 14.234 | 13.546 | 27.780 |
| 2 | Ambarawa | 8 | 63 | 14.071 | 13.493 | 27.564 |
| 3 | Banyumas | 11 | 51 | 8.292 | 7.897 | 16.189 |
| 4 | Gading Rejo | 23 | 159 | 20.701 | 20.006 | 40.707 |
| 5 | Pagelaran | 22 | 101 | 16.550 | 15.879 | 32.429 |
| 6 | Pagelaran Utara | 10 | 29 | 5.921 | 5.464 | 11.385 |
| 7 | Pardasuka | 13 | 87 | 16.505 | 15.808 | 32.313 |
| 8 | Pringsewu | 15 | 174 | 31.629 | 30.887 | 62.516 |
| 9 | Sukoharjo | 16 | 83 | 17.996 | 17.346 | 35.342 |
| | Total | 131 | 819 | 145.899 | 140.326 | 286.225 |

(Sumber: KPUD Kabupaten Pringsewu 2017)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah DPT pada Pilkada Kabupaten Pringsewu tahun 2017 adalah sebanyak 286.225 pemilih, dengan jumlah pemilih laki-laki adalah 145.899 pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 140.326 pemilih. Jumlah DPT tersebut tersebar pada 9 Kecamatan yang terdiri dari 131 desa dan 819 TPS. Tabel diatas menunjukkan Kecamatan dengan jumlah desa (pekon), sekaligus DPT terbanyak yaitu Kecamatan Pringsewu dengan 15 pekon, terbagi dalam 174 TPS, dengan jumlah DPT mencapai 62.516 DPT, yang terbagi atas 31.629

DPT berjenis kelamin laki-laki dan 30.887 DPT berjenis kelamin perempuan.

Tabel 1.4. Perolehan Suara Masing-masing Calon Pada Pilkada Kabupaten Pringsewu Tahun 2017

| No | Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu 2017 | Perolehan Suara/Kecamatan | Persentase (%) |
|----|---|---------------------------|----------------|
| 1. | Ardian Saputra – Dewi Arimbi | 68.643 | 35,60 |
| 2. | Sujadi Saddat – Fauzi | 88.162 | 45,77 |
| 3. | Siti Rahma – Edi Agus Yanto | 35.831 | 18,60 |

(Sumber: KPUD Kabupaten Pringsewu 2017)

Berdasarkan perolehan suara dan persentase di atas menunjukkan bahwa kemenangan diraih oleh pasangan calon nomor urut 2 (dua) yaitu Sujadi Saddat-Fauzi yang diusung oleh Gerindra, Demokrat, Golkar, PKS dan PKB mendapatkan jumlah suara sebanyak 88.162 dengan besaran persentase mencapai 45%. Diposisi kedua ditempati oleh pasangan calon nomor urut satu yaitu Ardian Saputra-Dewi Arimbi PDIP dan PPP meraih suara sebanyak 68.643 dengan jumlah persentasi yaitu 35,60%. Sedangkan posisi terakhir ditempati oleh pasangan calon nomor urut 3 (tiga) yaitu Siti Rahma-Edi Agus Yanto yang diusung oleh Nasdem, PAN memperoleh suara sebanyak 35.831 dengan persentase mencapai 18,60%.

Perolehan suara yang didapat oleh masing-masing pasangan calon di atas merupakan hasil akhir dari hak suara yang diberikan oleh pemilih berdasarkan hasil penghitungan suara. Namun secara tidak langsung pengguna hak suara disetiap kecamatan berbeda-beda, hal ini berdasarkan jumlah DPT, sebagaimana sebaran tingkat pengguna hak suara berikut:

Tabel 1.5. Tingkat Partisipasi Pemilih Per Kecamatan Pada Pilkada Kabupaten Pringsewu Tahun 2017

| No | Nama Kecamatan | DPT | Pengguna Hak Pilih | Persentase (%) |
|----|-----------------|--------|--------------------|----------------|
| 1. | Adiluwih | 27.760 | 19.333 | 70 |
| 2. | Ambarawa | 27.564 | 19.445 | 70 |
| 3. | Banyumas | 19.189 | 11.487 | 60 |
| 4. | Gading Rejo | 40.707 | 29.693 | 73 |
| 5. | Pagelaran | 32.429 | 23.171 | 71 |
| 6. | Pagelaran Utara | 11.385 | 7.821 | 67 |
| 7. | Pardasuka | 32.313 | 18.500 | 57 |
| 8. | Pringsewu | 62.516 | 43.463 | 69 |
| 9. | Sukoharjo | 35.372 | 22.633 | 64 |

(Sumber: KPUD Kabupaten Pringsewu 2017)

Berdasarkan tabel sebaran tingkat partisipasi Pilkada berdasarkan kecamatan di atas menunjukkan jumlah suara dan persentase tertinggi terdapat pada Kecamatan Gading Rejo dengan jumlah pengguna hak pilih mencapai 29.693 dan persentase mencapai 73%. Sedangkan jumlah suara dan persentase terendah terdapat pada Kecamatan Pardasuka yang mencapai 18.500 suara dengan persentase hanya mencapai 57%. Adapun tingkat partisipasi disetiap pekon berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6. Tingkat Partisipasi Pemilih Terendah Per Pekon Pada Pilkada Kabupaten Pringsewu Tahun 2017

| No | Pekon | Kecamatan | DPT | Jumlah Pengguna Hak Pilih | Jumlah Tidak Memilih | Persentase (%) |
|----|----------------|-----------------|-------|---------------------------|----------------------|----------------|
| 1 | Gading rejo | Gading Rejo | 5.325 | 3.324 | 2.001 | 62 |
| 2 | Margodadi | Ambarawa | 4.094 | 2.758 | 1.336 | 67 |
| 3 | Pardasuka | Pardasuka | 6.542 | 2.872 | 3.670 | 44 |
| 4 | Pasir ukir | Pagelaran | 1.844 | 1.047 | 797 | 56 |
| 5 | Sidoharjo | Pringsewu | 4.740 | 3.308 | 1.432 | 68 |
| 6 | Sinarwaya | Adiluwih | 727 | 434 | 293 | 60 |
| 7 | Sriwungu | Banyumas | 983 | 660 | 323 | 67 |
| 8 | Sukoharjo 3 | Sukoharjo | 4.199 | 2.137 | 2.062 | 50 |
| 9 | Sumber Bandung | Pagelaran Utara | 996 | 603 | 393 | 60 |

(Sumber: KPUD Kabupaten Pringsewu 2017)

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi terendah berdasarkan pekon terdapat pada pekon Pardasuka Kecamatan Pardasuka, dengan jumlah DPT mencapai 6.542 dan hanya tercatat sebanyak 2.872 yang memberikan hak suaranya, yang berarti jumlah pemilih yang tidak memberikan hak suaranya mencapai 3.670 DPT. Jika dipersentasekan tingkat partisipasi hanya mencapai 43%. Berikut merupakan tingkat partisipasi terendah Berdasarkan Kecamatan Pardasuka:

Tabel 1.7. Tingkat Partisipasi Setiap Pekon di Kecamatan Pardasuka Pada Pilkada Kabupaten Pringsewu Tahun 2017

| No | Pekon | DPT | Jumlah Pengguna Hak Pilih | Jumlah Tidak Memilih | Persentase (%) |
|----|---------------------|-------|---------------------------|----------------------|----------------|
| 1 | Kedaung | 1.491 | 958 | 533 | 64 |
| 2 | Pardasuka | 6.542 | 2.872 | 3.670 | 44 |
| 3 | Pardasuka Selatan | 1.103 | 628 | 475 | 57 |
| 4 | Pardasuka Timur | 1.452 | 768 | 684 | 53 |
| 5 | Pujodadi | 3.506 | 2.481 | 1.025 | 71 |
| 6 | Rantau Tijang | 1.771 | 1.037 | 734 | 58 |
| 7 | Selapan | 1.650 | 1.260 | 390 | 76 |
| 8 | Sidodadi | 3.082 | 1.899 | 1.183 | 62 |
| 9 | Suka Negeri | 594 | 262 | 332 | 45 |
| 10 | Sukorejo | 2.666 | 1.882 | 784 | 71 |
| 11 | Tanjung Rusia | 3.414 | 1.504 | 1.910 | 45 |
| 12 | Tanjung Rusia Timur | 980 | 653 | 327 | 67 |
| 13 | Warga Mulyo | 4.062 | 2.296 | 1.766 | 57 |

(Sumber: KPUD Kabupaten Pringsewu 2017)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan tingkat partisipasi terendah berdasarkan Kecamatan Pardasuka terdapat pada Pekon Pardasuka. Jumlah DPT Kecamatan Pardasuka mencapai 6.542 dan hanya tercatat sebanyak 2.872 yang memberikan hak suaranya, yang berarti jumlah pemilih yang tidak memberikan hak suaranya mencapai 3.670 DPT. Jika dipersentasekan tingkat partisipasi hanya mencapai 43%.

Selain pekon terdapat juga tingkat partisipasi terendah berdasarkan kelurahan seperti Kelurahan Pringsewu Timur yang persentase pemilih hanya sebesar 56% dari jumlah DPT 5824, sebagaimana keterangan pada tabel 8 berikut.

Tabel 1.8. Tingkat Partisipasi Terendah Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Pringsewu Pada Pilkada Kabupaten Pringsewu Tahun 2017

| No | Kelurahan | Kecamatan | DPT | Jumlah Pengguna Hak Pilih | Jumlah Tidak Memilih | Persentase (%) |
|----|-------------------|-----------|-------|---------------------------|----------------------|----------------|
| 1 | Fajar esuk | Pringsewu | 5.901 | 4.112 | 1.789 | 70 |
| 2 | Pringsewu Selatan | Pringsewu | 8.195 | 5.212 | 2.983 | 63 |
| 3 | Pringsewu Utara | Pringsewu | 6.608 | 4.760 | 1.848 | 72 |
| 4 | Pringsewu Barat | Pringsewu | 6.972 | 4.777 | 2.195 | 68 |
| 5 | Pringsewu Timur | Pringsewu | 6.159 | 3.629 | 2530 | 58 |

(Sumber: KPUD Kabupaten Pringsewu 2017)

Berdasarkan tabel di atas menginformasikan bahwa partisipasi terendah terdapat pada kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu. Jumlah DPT kelurahan Pringsewu Timur mencapai 6.159 dan hanya tercatat sebanyak 3.629 yang memberikan hak suaranya, yang berarti jumlah pemilih yang tidak memberikan hak suaranya mencapai 2,530 dari DPT. Jika dipersentasekan tingkat partisipasi hanya mencapai 58%

Pada penelitian ini melibatkan dua daerah dengan karakteristik yang berbeda antara kelurahan dan desa/pekon. Perbedaan karakteristik terlihat pada kelurahan misalnya yang cenderung lebih maju dibandingkan dengan desa/pekon, dapat dilihat dari akses informasi yang lebih cepat, pendidikan masyarakat yang cenderung lebih tinggi, fasilitas yang lebih lengkap dan lain sebagainya. Sedangkan desa yang secara kasat mata lebih terbatas.

Fenomena tersebut menjadi alasan penulis untuk melihat bagaimanakah penggunaan hak pilih masyarakat antara dua daerah yang mempunyai karakteristik berbeda dan memiliki partisipasi terendah, dimana kelurahan yang seharusnya mampu memberikan dampak signifikan pada peningkatan partisipasi melalui pola pikir dan segala penunjang yang lebih maju daripada desa/pekon.

Kurangnya Partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan di Pemilihan Kepala Daerah terjadi akibat menurunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk ikut berperan dalam menyalurkan aspirasinya melalui Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini terkait dengan minimnya informasi yang diterima masyarakat mengenai Pemilihan Kepala Daerah. Informasi tersebut cenderung hanya sebagian orang yang tahu karena sosialisasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dengan penyelenggara ditingkat bawah seperti Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) hingga Panitia Pemungut Suara (PPS) ditingkat desa belum maksimal.

Para pemilih yang golput termasuk kedalam masyarakat yang rendah partisipasinya. Karena golput dari data yang diperoleh merupakan ketidakmampuan masyarakat untuk melaksanakan haknya dalam pemilihan kepala daerah karena alasan politis, sebab masyarakat yang terdaftar tadi tidak menggunakan hak suaranya dengan berbagai alasan, misalnya kesibukkan masyarakat yang membuat mereka tidak melakukan pemilihan pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pilkada merupakan ajang

pemilihan kepala daerah secara langsung yang dilakukan oleh masyarakat di daerah, artinya masyarakat dapat menentukan sendiri siapa putra terbaik daerah yang akan memimpin wilayahnya dalam waktu 5 tahun kedepan.

Secara umum yang menjadi hambatan penggunaan hak pilih masyarakat diantaranya; (1) kejenuhan terhadap pemilu, terlalu banyak pemilihan seperti pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan legislatif, pemilihan bupati, sampai pada pemilihan kepala desa; (2) telah memudar tentang harapan, telah luntur harapan konkrit mengenai pelaksanaan pemilihan, masyarakat merasa pemilu tidak membawa perubahan apapun dalam kehidupan mereka; (3) hilangnya kepercayaan terhadap politisi; (4) kurangnya pengetahuan tentang sistem pemilu; (5) serta sistem pemilu yang ruwet dan berbelit-belit menyebabkan masyarakat enggan untuk memilih. Selain kelima faktor yang dikemukakan di atas, masih terdapat sejumlah faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya perilaku tidak memilih tersebut. Menemukan faktor-faktor yang menyebabkan perilaku tidak memilih pada wilayah partisipasi terendah yaitu pada kelurahan Pringsewu Timur dan pekon Pardasuka merupakan fokus utama dalam rencana penelitian ini.

Dalam Penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian terdahulu sebagai salah satu referensi, dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

1. Nabillah Ayu Damita. "Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2013 di Kabupaten Lumajang". Tujuan Penelitian ini yaitu untuk menjelaskan tingkat partisipasi politik, mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi rendahnya partisipasi

politik, upaya apa saja yang dilakukan oleh KPU, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi KPU. Hasil penelitian ini meliputi partisipasi masyarakat tergolong tinggi sebesar 70,87%. Faktor yang mempengaruhi yaitu perangsang politik melalui media massa, karakteristik pribadi, sosial politik. Upayang yang dilakukan KPU yaitu sosialisasi, mendatangi pihak pencetak surat suara, membentuk relawan demokrasi dan melaksanakan pendidikan politik. Kendala KPU yaitu konflik partai, keadaan geografis dan pola pikir masyarakat.

Hasil penelitian nabillah ayu damita partisipasi masyarakat tergolong tinggi karena adanya faktor perangsang politik melalui media, faktor karakteristik pribadi, sosial dan politik. Sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada faktor rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada khususnya pada Kelurahan Pringsewu Timur dan Pekon Pardasuka Kabupaten Pringsewu.

2. Andi Hartina, “Partisipasi Politik Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013 Di Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi pemilih dengan fokus penelitian pemberian hak suara pada pemilu, keterlibatan dalam diskusi politik, dan keterlibatan dalam kampanye. Penelitian ini menggunakan teori menurut Gabriel (2005:12) yaitu (a) Konvensional, yaitu pemberian suara (Diskusi politik, kampanye, dan komunikasi individual dengan pejabat politik). (b) Non konvensional,

yaitu pengajuan petisi, demonstrasi dan tindakan kekerasan politik terhadap harta benda serta tindakan kekerasan terhadap manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat partisipasi pemilih masih rendah karena minimnya informasi yang didapat tentang pilkada dan menurunnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan haknya melalui pilkada.

3. Yoserizal, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah". Penelitian ini dilaksanakan pada pilkada di kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011, dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan partisipasi cukup baik, faktor yang paling cenderung memberikan pengaruh dalam pilkada adalah adanya kemauan dan kemampuan.
4. Riyadh, "Partisipasi Politik Masyarakat Dusun Prajjan Utara dan Dusun Prajjan Selatan Dalam Proses Pemilihan Kepala Tahun 2007" Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor perbedaan partisipasi. Dengan hasil penelitian perbedaan partisipasi terjadi karena adat istiadat dan budaya, dimana dusun Utara lebih kental dengan adatnya dan lebih aktif dalam urusan politik. Sedangkan dusun selatan yang telah mengalami degradasi nilai terhadap adat istiadat dan budaya daerahnya dan mayoritas penduduknya merupakan penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi partisipasi politik masyarakatnya malah

cenderung kurang aktif dan cenderung terlibat dalam praktek politik praktis.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas terdapat sebuah kesimpulan bahwa masalah yang ditimbulkan terhadap rendahnya partisipasi politik dalam Pilkada diantaranya meliputi minimnya informasi yang didapat tentang pilkada dan menurunnya kesadaran masyarakat serta faktor luntarnya adat istiadat. Namun dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada faktor penghambat penggunaan hak pilih dua daerah yang merupakan representasi daerah perkotaan yaitu kelurahan Pringsewu Timur dan pedesaan yaitu pekon Pardasuka dalam Pilkada Kabupaten Pringsewu tahun 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Faktor-Faktor Hambatan Penggunaan Hak Pilih Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 khususnya di Kelurahan Pringsewu Timur dan Pekon Pardasuka ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-Faktor Hambatan Penggunaan Hak Pilih Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 khususnya di Kelurahan Pringsewu Timur dan Pekon Pardasuka.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini meliputi:

1. Secara teoritis, dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dalam bidang Akademik mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan dan menambah pengetahuan politik, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan hak pilih masyarakat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi KPU untuk memaksimalkan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pemilih. Selain itu memberikan pemahaman kepada publik bahwa partisipasi politik merupakan hak bagi setiap warganegara yang telah berusia 17 tahun dan atau sudah menikah sesuai ketentuan Undang-Undang yang mestinya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai Pemerintahan yang demokratis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sebuah proses demokrasi dimana terjadi pergantian kepemimpinan daerah pada tingkat lokal. Sarundajang (2011:117) mengatakan bahwa Pilkada sebagaimana pemilu nasional merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara damai dan teratur. Melalui pilkada, rakyat akan secara langsung memilih pemimpinnya di daerah sekaligus memberikan legitimasi kepada siapa yang berhak dan mampu untuk memerintah, pilkada dengan kata lain merupakan seperangkat aturan atau metode bagi warga negara untuk menentukan masa depan pemerintahan yang absah (*legitimate*).

Selanjutnya Suharizal (2011:7) berpendapat secara filosofis munculnya gagasan tentang pilkada secara langsung itu pada dasarnya merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah-daerah yang sedang dimulai. Pilkada langsung diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang kredibel dan didukung oleh rakyat.

Pada prinsipnya pemilihan kepala daerah langsung merupakan refleksi dari demokratisasi yang mencerminkan adanya kedaulatan rakyat dan legitimasi kekuasaan pemerintah daerah secara bersamaan. Pemilihan kepala daerah secara langsung menggambarkan adanya sebuah mekanisme pembentukan

pemerintahan yang terlegitimasi karena merupakan hasil dari proses politik yang telah disesuaikan dengan aturan perundangan yang berlaku, serta sarana berpartisipasi masyarakat dalam kegiatan politik lokal.

Pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi.

Berdasarkan materi revisi undang-undang tersebut, pemilihan kepala daerah yang saat ini dilaksanakan secara serentak tidak menjadi jaminan untuk bebas dari permasalahan, akan tetapi pilkada serentak bisa memberi semangat baru baik bagi penyelenggara maupun dari segi keterlibatan elemen masyarakatnya. Pilkada serentak yang diamanatkan pada Undang-Undang di atas dibagi pada berapa gelombang, didalam pasal 201 UU No.1 tahun 2015 disebutkan bahwa:

1. Gelombang pertama pemilihan serentak dilaksanakan bulan Desember 2015 untuk Gubenur, Bupati dan Walikota yang akhir masa jabatannya pada tahun 2015 s.d. Juni 2016.
2. Gelombang kedua pemilihan pemilihan kepala daerah serentak pada dilaksanakan bulan Februari 2017 untuk Gubernur, Bupati dan

Walikota yang akhir masa jabatannya pada bulan Juli s.d. Desember 2016 dan 2017.

3. Gelombang ketiga pemilihan pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan bulan Juni 2018, untuk Gubernur, Bupati dan Walikota yang akhir masa jabatannya 2018 dan 2019.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh masyarakat di tingkat lokal untuk memilih pemimpin ataupun pejabat politik untuk memimpin daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai wujud implikasi dari pelaksanaan azas desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah.

B. Konsep Partisipasi Politik

Keputusan politik yang menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka masyarakat berhak mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Agustino (2007:58) partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi, asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Keikutsertaan masyarakat dalam penyampaian aspirasi berupa kegiatan memberi dukungan politik dalam berbagai kegiatan, terutama dalam kegiatan kampanye dan pemberian suara dalam pemilihan umum serta dalam proses penetapan kebijakan politik. Arifin (2014:69) partisipasi ialah keterlibatan individu-individu dalam bermacam-macam tindakan dalam kehidupan politik. Termasuk di dalamnya adalah partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah.

1. Sifat partisipasi politik

Partisipasi politik merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Efriza (2012:164) di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk keputusan yang mengikat, dengan kata lain mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jelaslah bahwa partisipasi politik erat sekali dengan kesadaran politik, karna semakin sadar bahwa dirinya di perintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Perasaan kesadaran seperti ini dimulai dari orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang terkemuka. Sebelumnya, di Eropa hanya elit masyarakat saja yang diwakili dalam perwakilan, di negara Amerika perempuan baru mempunyai hak suara setelah adanya amandemen ke-19 pada tahun 1920, tetapi perlahan-lahan keinginan untuk berpartisipasi menjangkau semua sektor masyarakat, laki-laki dan perempuan, dan mereka menuntut hak untuk bersuara.

Sedangkan ilmuwan Indonesia Dedi Irawan, menjelaskan bahwa sifat partisipasi politik terdiri dari lima bentuk yakni:

- a. Legal (sesuai dengan prosedur) dan illegal (tidak prosedural)
- b. Konvensional (lunak) dan non konvensional (kekerasan politik)
- c. Otonom dan mobilisasi
- d. Mendukung dan menolak
- e. Langsung dan tidak langsung

Ada kemungkinan orang tidak ikut memilih karna berpendapat bahwa keadaan tidak terlalu buruk dan bahwa siapapun yang akan dipilih tidak akan mengubah keadaan itu. Dengan demikian iya tidak merasa perlu memanfaatkan hak pilihnya. Jadi “apatis” dalam pandangan ini tidak

menunjuk pada rasa kecewa atau frustrasi, tetapi malahan sebagai manifestasi rasa puas dan kepercayaan terhadap sistem politik yang ada.

2. Tipologi Partisipasi Politik

Bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh warga masyarakat untuk mempengaruhi bentuk dan jalannya *public policy*. Sehingga kualitas dari hirarki partisipasi politik masyarakat dilihat dalam keaktifan atau kepasifan (apatis) dari bentuk partisipasi politik masyarakat. Menurut Dusseldorp dalam Efriza (2012:168) salah satu cara untuk mengetahui kualitas partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari bentuk-bentuk keterlibatan seseorang dalam berbagai tahap proses pembangunan yang terencana mulai dari perumusan tujuan sampai dengan penilaian.

Huntington dan Nelson menemukan bentuk-bentuk partisipasi politik, meliputi:

a. Kegiatan Pemilihan

Mencakup suara juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.

b. *Lobbying*

Mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin

politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. Seperti, kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan dukungan bagi atau oposisi terhadap suatu usul legislatif atau keputusan administratif tertentu.

c. Kegiatan organisasi

Menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisif adalah mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pemerintah.

d. Mencari koneksi (*contacting*)

Merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.

e. Tindakan kekerasan (*violence*)

Merupakan suatu bentuk partisipasi politik, dan untuk keperluan analisis ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri; artinya sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

Perilaku tidak memilih merupakan fenomena yang marak terjadi pada penyelenggaraan pemilihan umum. Menurut Efriza (2012:182) terdapat bentuk partisipasi yaitu sekelompok orang yang menganggap masyarakat

dan sistem politik yang ada dinilai telah menyinggung dari apa yang telah dicita-citakan sehingga tidak ikut serta dalam politik. Orang-orang yang tidak ikut dalam politik mendapat beberapa julukan diantaranya:

a. *Apatis* (masa bodoh)

Diartikan sebagai tidak punya minat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala. Seperti banyak pola tingkah laku, hal ini sering dihubungkan dengan suatu sindrom kepribadian tertentu.

b. *Sinisme*

Menurut Agger diartikan sebagai “kecurigaan busuk dari manusia”, dalam hal ini dia melihat bahwa politik adalah urusan yang kotor, tidak dapat dipercaya, dan menganggap partisipasi politik dalam bentuk apapun sia-sia dan tidak ada hasilnya.

c. *Alienasi*

Menurut Lane sebagai perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintahan masyarakat dan kecenderungan berfikir mengenai pemerintahan dan politik bangsa yang dilakukan oleh orang lain untuk orang lain tidak adil.

d. *Anomie*

Menurut Lane diungkapkan sebagai suatu perasaan kehidupan nilai dan ketiadaan awal dengan kondisi seorang individu mengalami perasaan ketidakefektipan dan bahwa para penguasa bersikap tidak peduli yang mengakibatkan devaluasi dari tujuan-tujuan dan hilangnya urgensi untuk bertindak.

Berdasarkan fenomena ini W. Page memberikan model partisipasi menjadi empat tipe :

- a. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif
- b. Sebaliknya kesadaran dan kepercayaan sangat kecil maka partisipasi politik menjadi pasif dan apatis.
- c. Partisipasi politik tinggi tetapi tingkat kepercayaan terhadap pemerintah lemah maka perilaku yang muncul adalah militan radikal
- d. Kesadaran politik rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah tinggi maka partisipasinya menjadi sangat pasif, artinya hanya berorientasi output politik.

Kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat harus terus di dukung dan disadari secara bersama, baik terhadap lembaga yang berwenang maupun pada individu masing-masing. Cunningham (2002:123) Demokrasi partisipatif tidak hanya konseptual bertentangan dengan catteralaxy dan elitisme demokratis tetapi juga lawan sejarah. Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya berbagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

3. Partisipan Politik

Partisipasi politik yang merupakan tindakan politik atau perilaku politik terjadi sebagai refleksi dari citra, sikap, dan opini politik sebagai bentuk efek motorik komunikasi politik terhadap warga negara selaku khalayak politik. Sedangkan dari perspektif ilmu politik partisipasi politik disebut sebagai tindakan politik warga negara yang dilakukan oleh individu-individu yang bukan politikus atau bukan pemimpin politik, mereka itu disebut sebagai partisipan politik, yaitu pengikut politik atentif atau yang berminat dan ikut dalam kegiatan politik. Selain itu, terdapat juga pengikut politik yang tidak bersungguh-sungguh atau acuh tak acuh, baik partisipan politik sebagai peserta yang atentif, maupun pengikut politik yang tidak bersungguh-sungguh atau acuh tak acuh merupakan khalayak politik, dalam perspektif atau paradigma mekanistik.

Warga negara yang pada umumnya berpendidikan, memang memiliki kesadaran akan hak dan kedaulatan yang dimilikinya serta yakin dan percaya bahwa keterlibatannya dalam berbagai kegiatan politik memiliki manfaat dan efek politik bagi kepentingan bangsa dan negara. Huntington dan Nelson dalam Arifin (2014:73) mengemukakan partisipan politik yang otonom, yaitu warga negara yang bukan politikus melakukan kegiatan politik atas kemauan dan kesadaran sendiri tanpa digerakkan, yang disebut *autonomous participation* (partisipasi yang bersifat otonom). Partisipasi ini merupakan bentuk partisipasi yang dilakukan secara sukarela oleh individu-individu warga

negara, hal itu dapat dikatakan sebagai bentuk efek dari efektifnya sosialisasi politik dan komunikasi politik.

Selain partisipan politik yang melakukan partisipasi yang bersifat politik, terdapat juga partisipan politik yang melakukan partisipasi yang bersifat negatif. Partisipasi politik yang bersifat positif antara lain partisipan politik yang aktif dalam kegiatan politik seperti pemilihan umum, sedangkan partisipasi politik yang bersifat negatif, antara lain partisipan politik yang melakukan demonstrasi, teror politik, pembunuhan politik. Orang-orang ini disebut apatis yaitu warga negara yang sama sekali tidak mau melibatkan diri dalam politik, karena berbagai macam alasan.

Nimmo (2010:132) tipe partisipasi rakyat yang dipublikasikan dan diteliti paling luas ialah pengambilan bagian dalam pemilihan umum dengan memberikan suara. Namun, terdapat kontinum kemungkinan tindakan pemilihan. Mulai dari yang paling mudah dilaksanakan sampai yang paling sukar dalam penggunaan waktu, uang, dan energi.

Suharizal (2012:137) pasca pilkada langsung, parameter keberhasilan pemerintahan daerah, khusus parameter bagi kepala daerah yang dipilih secara langsung dalam menjalankan otonomi daerah adalah terjadinya perbaikan indeks kemakmuran rakyat (*human development Index-HDI*) di daerah terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut bukan sebanyak mungkin Pemda menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selama ini, terlihat bagaimana komunitas masyarakat tradisional tidak memiliki kemampuan atau kepercayaan untuk berargumentasi dengan kekuasaan negara ketika tidak terjadi kesesuaian. Susanto (2013:160) Pada pemilu masa orde baru, Golkar muncul sebagai mayoritas tunggal, Hal sebagian dimungkinkan karena adanya sistem politik yang birokratik patrimonial dengan basis utama aparatur pemerintah yang bertindak sebagai mesin politik untuk menanggung konsituen. Dalam pandangan Duverger (1998:137), “di lingkungan masyarakat tradisional yang belu lazim menjalankan demokratisasi, kekuasaan negara lebih mudah untuk mengandalikan masyarakat untuk mendukung kepentingannya”.

C. Penyebab Tidak Memilih Pada Pilkada

Fenomena dalam partisipasi, kebijakan merupakan faktor utama yang menanamkan sebuah opini yaitu aktif dalam partisipasi. Terlebih partisipasi politik yang menjadi identitas berdemokrasi. Dunn dalam Weimer dan Vining (1992:2) analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan beberapa metode penyelidikan dan argumen untuk menghasilkan dan mengubah kebijakan informasi yang relevan yang dapat digunakan dalam pengaturan politik untuk menyelesaikan masalah kebijakan.

Menurut Ramlan Surbakti dalam Efriza (2012:195), tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang dipengaruhi faktor lain seperti status sosial dan ekonomi , afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang

dimaksud dengan status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Yang dimaksud dengan status ekonomi ialah kedudukan orang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Hal ini diketahui dari pendapatan, pengeluaran, ataupun pemilikan benda-benda berharga. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga minat dan perhatian pada politik, serta sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah

Menurut Damsar dalam Efriza (2012:195) partisipasi politik dipengaruhi oleh variabel status sosial ekonomi dikenal dengan singkatan SSE. Dalam variabel status sosial ekonomi terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk melakukan analisis tentang suatu hubungan atau pengaruh, yaitu antara lain pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan kekayaan.

1. Pendidikan

Seseorang yang berpendidikan tinggi lebih cenderung memiliki partisipasi politik yang tinggi dibandingkan individu yang berpendidikan rendah. Namun, bisa jadi sebaliknya yaitu seseorang yang berpendidikan tinggi lebih rendah partisipasi politiknya dibandingkan dengan seseorang yang berpendidikan rendah. Secara kasuistik hal tersebut dimungkinkan terjadi, misalnya bisa saja seseorang yang berpendidikan tinggi memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan seseorang yang berpendidikan rendah tentang para pasangan calon kepala daerah, sehingga keputusan untuk tidak memilih

dalam pilkada merupakan pilihan yang masuk akal. Karena orang yang berpendidikan tinggi tersebut bahwa dari pasangan calon kepala daerah yang ada tidak ada satupun yang pantas untuk menjadi kepala daerah berdasarkan perspektif dirinya. Oleh sebab itu, dirinya tidak ikut berpartisipasi dalam pilkada melalui ketidakhadirannya di TPS.

2. Pekerjaan

Pekerjaan yang lebih bagus seperti dokter, akuntan, notaris, pengusaha, pengacara, dosen dsb memiliki cakrawala pemikiran yang lebih tinggi, suasana dan situasi kerja yang lebih kondusif dibandingkan pekerjaan yang kurang baik seperti nelayan, buruh, petani, dan pekerjaan kasar lainnya. Kelompok pekerja yang disebutkan pertama lebih mempunyai kesadaran politik dibandingkan oleh kelompok pekerjaan yang kedua. Kelompok kerja yang kedua cenderung lebih mementingkan untuk pergi mencari nafkah dibandingkan untuk menunda pekerjaannya untuk ikut memberikan hak suaranya dalam pemilihan. Berbeda dengan kelompok pekerjaan yang pertama, kesempatan untuk memberikan suara pada suatu pemilu lebih lapang.

3. Pendapatan

pendapatan merupakan variabel yang menunjukkan berapa banyak uang atau barang yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu, misalnya perminggu, dwimingguan, setengah bulanan, atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Jumlah pendapatan yang diterima dapat memengaruhi akses dan kesempatan untuk melakukan sesuatu, termasuk partisipasi

politik. Seorang yang memiliki pendapatan rendah cenderung lebih tertutup untuk berpartisipasi dalam politik, sebab pendapatan erat kaitannya dengan jenis pekerjaan. Begitu sebaliknya yang mempunyai pendapatan tinggi disetiap periodenya.

4. Kekayaan

Setiap pendapatan dapat dipandang sebagai kekayaan dari seseorang atau kelompok orang. Namun tidak semua kekayaan berasal dari pendapatan. Bisa saja pendapatan seseorang dari pekerjaannya relatif tidak besar namun karena dia memiliki harta warisan yang banyak maka situasi dan kesempatan hidup yang dimiliki bisa lebih besar.

Nazaruddin, Hamid dan Toto dalam Efriza (2012:104) mengemukakan bahwa tinggi rendahnya partisipasi politik di negara-negara berkembang sangat ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu:

1. Tingkat pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi tingkat kesadaran politiknya pun semakin tinggi pula. Jadi dalam masyarakat yang mempunyai kesadaran politik tinggi, yang disebabkan oleh tingginya kualitas pendidikan atau tersebarnya pendidikan di dalam masyarakat, maka partisipasi politik akan tinggi.

2. Tingkat kehidupan ekonomi

Masyarakat yang mempunyai tingkat kehidupan ekonomi yang rendah, maka tingkat partisipasinya pun akan rendah. Masyarakat yang mempunyai tingkat ekonomi rendah akan dipaksa oleh keadaan untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada usaha mencukupi kebutuhan ekonomi. Dengan demikian akan sangat minim bagi masyarakat yang mempunyai tingkat ekonomi rendah untuk melakukan kegiatan-kegiatan diluar bidang ekonomi termasuk partisipasi politik

3. Fasilitas-fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya partisipasi politik (sistem komunikasi)

Kesempatan yang mungkin diperoleh dalam masyarakat-masyarakat yang mempunyai sistem komunikasi yang baik tidak akan diperoleh oleh negara berkembang. Sebab dalam negara berkembang komunikasi lebih banyak bersifat dari atas ke bawah jarang komunikasi dari bawah keatas terjadi.

Arianto Merujuk pendapat Arbi Sanit (2011:60) golput dapat diklasifikasi menjadi tiga. Yaitu Pertama; menusuk lebih dari satu gambar partai, Kedua; menusuk bagian putih dari kartu suara, Ketiga; tidak mendatangi kotak suara dengan kesadaran untuk tidak menggunakan hak pilih. Sedangkan menurut Novel Ali dapat dibagi dua kelompok golput awam dan kelompok golput pilihan. Secara lebih detail diuraikan oleh Eep Saefulloh Fatah golput teknis, golput teknis-politis, golput politis-ideologis.

Secara umum faktor yang menyebabkan masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya secara sederhana dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok besar yaitu faktor dari internal pemilih dan faktor eksternal. Faktor internal yang penulis maksud adalah alasan pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu bersumber dari dirinya sendiri, sedangkan eksternal alasan tersebut datang dari luar dirinya. Secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1. Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Tidak Pemilih

| No | Internal | Eksternal |
|----|-----------|---------------|
| 1 | Teknis | Administratif |
| 2 | Pekerjaan | Sosialisasi |
| 3 | - | Politik |

(Sumber : Eep Saefulloh Fatah dalam Arbi Sanit (2011:60))

a. Faktor Internal

Tabel di atas menunjukkan tiga alasan yang datang dari individu pemilih yang mengakibatkan mereka tidak menggunakan hak pilih. Diantaranya alasan teknis dan pekerjaan pemilih.

1. Teknis

Faktor teknis yang penulis maksud adalah adanya kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih. Seperti pada saat hari pencoblosan pemilih sedang sakit, pemilih sedang ada kegiatan yang lain serta berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Kondisi itulah yang secara teknis membuat pemilih tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

Faktor teknis ini dalam pemahaman dapat di klasifikasikan ke dalam dua hal yaitu teknis mutlak dan teknis yang bisa di tolerir. Teknis mutlak adalah kendala yang serta merta membuat pemilih tidak bisa hadir ke TPS seperti sakit yang membuat pemilih tidak bisa keluar rumah, Sedang berada di luar kota, kondisi yang seperti yang penulis maksud teknis mutlak. Teknis yang dapat di tolerir adalah permasalahan yang sifatnya sederhana yang melakat pada pribadi pemilih yang mengakibatkan tidak datang ke TPS, Seperti ada keperluan keluarga, merencanakan liburan pada saat hari pemilihan.

2. Pekerjaan

Faktor pekerjaan pemilih memiliki kontribusi terhadap jumlah orang yang tidak memilih. Faktor pekerjaan di sektor informal, dimana penghasilannya sangat terkait dengan intensitasnya bekerja, banyak dari sektor informal yang baru mendapatkan penghasilan ketika mereka bekerja, tidak bekerja berarti tidak ada penghasilan. Seperti tukang ojek, buruh harian, nelayan, petani harian, kemudian ada pekerjaan masyarakat yang mengharuskan mereka untuk meninggalkan tempat tinggalnya seperti para pelaut, penggali tambang. Kondisi seperti membuat mereka harus tidak memilih, karena faktor lokasi mereka bekerja yang jauh dari TPS.

Maka dalam pemahaman penulis faktor pekerjaan cukup signifikan pada faktor internal membuat pemilih untuk tidak memilih. Pemilih dalam kondisi seperti ini dihadapkan pada dua pilihan menggunakan hak pilih yang akan mengancam berkurang yang penghasilannya atau pergi bekerja dan tidak memilih.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal faktor yang berasal dari luar yang mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Ada tiga yang masuk pada kategori ini menurut pemilih yaitu aspek administratif, sosialisasi dan politik.

1. Administratif

Faktor administratif adalah faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut dalam pemilihan.

Pemilih tidak akan bisa menggunakan hak pilih jika tidak terdaftar sebagai pemilih. Kasus pemilu Pilkada di DKI Jakarta pada tahun 2017 adalah buktinya banyaknya masyarakat Jakarta yang tidak bisa ikut dalam pemilu karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Jika kondisi yang seperti ini terjadi maka secara otomatis masyarakat akan tergabung kedalam kategori golput.

Faktor berikut yang menjadi penghalang dari aspek administrasi adalah permasalahan kartu identitas. Masih ada masyarakat tidak memiliki KTP, jika masyarakat tidak memiliki KTP maka tidak akan terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) karena secara administratif KTP yang menjadi rujukkan dalam mendata dan membuat DPT. Maka masyarakat baru bisa terdaftar sebagai pemilih minimal sudah tinggal 6 bulan di satu tempat.

Golput yang diakibat oleh faktor administratif ini bisa diminimalisir jika para petugas pendata pemilih melakukan pendataan secara benar dan maksimal untuk mendatangi rumah-rumah pemilih. Selain itu dituntut inisiatif masyarakat untuk mendatangi petugas pendataan untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Langkah berikutnya DPS (Daftar Pemilih Sementara) harus tempel di tempat-tempat strategis agar bisa dibaca oleh masyarakat.

Masyarakat juga harus berinisiatif melacak namanya di DPS, jika belum terdaftar segera melapor ke pengurus RT atau petugas pendataan. Langkah berikut untuk menimalisir terjadi golput, karena aspek administrasi adalah dengan memanfaatkan data kependudukan berbasis IT upaya elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) yang dilakukan pemerintahan sekarang dalam pandangan penulis sangat efektif dalam menimalisir golput administratif.

2. Sosialisasi

Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini disebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur, pemilu legislatif dan pemilu presiden hal ini belum dimasukkan pemilihan yang lebih kecil seperti RT/ RW.

Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda. Pentingnya sosialisasi dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilu dan meminimalisir angka golput dalam setiap pemilu. Terlepas dari itu semua penduduk di Indonesia sebagai besar berada di pedesaan maka menyebarluaskan informasi pemilu dinilai penting, apalagi bagi masyarakat yang jauh dari akses transportasi dan informasi, maka sosialisasi dari mulut ke mulut menjadi faktor kunci mengurangi angka golput.

3. Politik

Faktor Politik erat kaitannya dengan ideologi partai politik, ketidaksepahaman dengan sebuah ideologi dapat menjadi salah satu pengaruh pemilih untuk tidak menyalurkan suaranya dalam pilkada. Ideologi merupakan landasan yang mendasari sebuah partai politik dalam menjalankan fungsinya. Tanpa ideologi yang jelas tidak

mungkin sebuah organisasi seperti partai politik mampu menjalankan fungsinya bahkan tidak mungkin berdiri.

Faktor politik adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti tidak percaya kepada partai tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Kondisi-kondisi yang seperti penulis uraikan ini yang secara politik memengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Sebagian Masyarakat semakin tidak yakin dengan politisi. Harus diakui tidak semua politisi seperti ini, masih banyak politisi yang baik, namun mereka yang baik tenggelam dikalahkan politisi yang tidak baik.

Hingga saat ini, ada sejumlah penjelasan yang dikemukakan oleh para pengamat atau penyelenggara Pemilu tentang penyebab adanya Golput. Eriyanto (2007:20) mengatakan ada empat alasan mengapa pemilih golput yaitu karena administratif, teknis, rendahnya keterlibatan atau ketertarikan pada politik (*political engagement*) dan kalkulasi rasional.

1. Administratif.

Seorang pemilih tidak ikut memilih karena terbentur dengan prosedur administrasi seperti tidak mempunyai kartu pemilih, tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan sebagainya.

2. Teknis

Seseorang memutuskan tidak ikut memilih karena tidak ada waktu untuk memilih seperti harus bekerja di hari pemilihan, sedang ada keperluan, harus ke luar kota di saat hari pemilihan dan sebagainya

3. Rendahnya keterlibatan atau ketertarikan pada politik (*political engagement*).

Seseorang tidak memilih karena tidak merasa tertarik dengan politik, acuh dan tidak memandang Pemilu atau Pilkada sebagai hal yang penting.

4. Kalkulasi rasional

Pemilih memutuskan tidak menggunakan hak pilihnya karena secara sadar memang memutuskan untuk tidak memilih. Pemilu legislatif dipandang tidak ada gunanya, tidak akan membawa perubahan berarti atau tidak ada calon kepala daerah yang disukai dan sebagainya. Selain itu, perhitungan untung rugi yang diperoleh juga menjadi pertimbangan pemilih untuk memberikan hak suaranya, ditambah adanya kekecewaan terhadap kepemimpinan pemerintah yang tidak menunjang perubahan dan keberpihakan kepada rakyat.

Asfar (1998:173). Isitilah perilaku tidak memilih lebih dikenal dengan golput (golongan putih). Dalam berbagai literatur perilaku memilih, perilaku tidak memilih umumnya digunakan untuk merujuk pada fenomena ketidakhadiran seseorang dalam Pemilu. Ariyanto (2011:54) *non voting* merupakan mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan

tujuan yang jelas menolak memberikan suara pada Pemilu dalam Oleh karenanya perilaku *non voting* umumnya dimanifestasikan dalam bentuk ketidakhadiran pada saat pemilihan.

Pandangan lainnya, dikemukakan Surbakti (2010:185), berkenaan dengan partisipasi politik. Keikutsertaan warga negara dalam proses pemilihan khususnya kegiatan pemungutan suara merupakan serangkaian kegiatan pembuatan keputusan untuk menentukan pemimpin dari pemerintahan daerah tersebut, apakah akan memilih atau tidak memilih. Tidak memilih berarti bisa dikatakan seseorang tersebut memiliki hak pilih namun tidak menggunakan hak pilih.

Pemilih yang tidak memilih di Indonesia lebih dikenal dengan istilah golput (golongan putih). Pahmi (2010:65) berpendapat bahwa golput atau Golongan Putih adalah sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam suatu pemilihan. Dalam pengertian ini ada kategori orang yang memang sejak awal tidak mau didaftarkan sebagai pemilih, namun ada juga orang-orang yang memang terdaftar sebagai pemilih namun tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan.

Menurut Arief Budiman dalam Prihatmoko (2003:150) yang dimaksud golput adalah golput bukan organisasi, tanpa pengurus, dan hanya merupakan pertemuan solidaritas. Golput adalah sebuah identifikasi bagi mereka yang tidak puas dengan keadaan dan aturan main demokrasi yang diinjak-injak oleh partai politik dan pemerintah demi memenangkan pemilu dengan menggunakan aparat negara melalui cara di luar batas aturan

main demokratis. Keberadaan golput mengindikasikan bahwa proses politik yang sedang berlangsung tidak benar. Kendati tidak memiliki kekuatan politik, golput melakukan gerakannya dengan diam.

D. Partisipasi Politik Masyarakat Desa

Masyarakat desa identik dengan kehidupannya yang sederhana dan kental akan adat istiadat dan kearifan lokal lainnya. Amal (1996:86) dalam masyarakat agraris, dengan tingkat spesialisasi pekerjaan dan identitas kelas yang rendah, kebanyakan orang mendefinisikan kepentingan dan membedakan diri mereka satu sama lain lebih atas dasar tempat mereka tinggal daripada apa yang mereka lakukan. Mereka memiliki rasa kasih sayang yang kuat terhadap tempat tinggal dan para tetangga mereka, dan jika berada pada situasi pemilu, mereka memusatkan perhatian pada kebutuhan dasar komunitas lokal dan wilayah sekitar apakah mereka memiliki air yang cukup, sekolah-sekolah, fasilitas kesehatan, apakah ada jalan ke pasar, apakah harga produsen untuk komoditas pertanian memberikan keuntungan yang adil bagi petani lokal dan lain sebagainya.

Warga daerah pedesaan tertentu biasanya memiliki sejumlah kepentingan politik bersama dan mereka memberikan suara berdasarkan kebutuhan dasar. Ini menjelaskan konsentrasi suara secara geografis untuk partai-partai yang bersain dalam putaran pemilu multi partai dewasa ini di daerah-daerah yang berbeda dan cenderung memiliki rasa identitas kelas dan pekerjaan yang kuat. Orang-orang yang tinggal di tempat yang sama memberi suara untuk partai politik yang sama.

E. Partisipasi Politik Masyarakat Kota/Kelurahan

Kota/kelurahan merupakan daerah yang ketika didalamnya terdapat pengaruh modernisasi yang cukup tinggi, dimana disebut kota jika memenuhi kriteria seperti infrastruktur, tingkat pendidikan, mayoritas pekerjaan, pola hidup masyarakat dan sebagainya lebih maju dibandingkan desa yang cenderung lebih terbatas. Papasi (2010:85) suatu masyarakat Negara yang sedang maju akan mengalami banyak perubahan-perubahan dalam arti sosial ekonomi dan politik dan lain sebagainya dan keadaan yang demikian itu menimbulkan kesukaran bagi penyelidik politik, perbandingan karena elemen-elemen atau unit-unit yang diselidiki itu mempunyai kecenderungan untuk berubah ubah. Artinya masyarakat kota/kelurahan telah mengalami perubahan-perubahan baik secara budaya, sosial ekonomi dan politik yang disebabkan oleh arus modernisasi yang cukup kuat.

Masyarakat kota/kelurahan mempunyai hak yang sama dengan masyarakat yang tinggal di desa dalam hal politik, hanya saja faktor penunjang masyarakat kota/kelurahan lebih baik daripada masyarakat pedesaan. Thoha (2011:102) kesamaan politik memerlukan bahwa setiap warga negara dewasa mempunyai kesempatan yang sama dengan yang lainnya untuk berperan serta dalam proses pembuatan kebijakan atau keputusan politik. Prinsip ini seringkali diwujudkan dengan semboyan *one person one vote*, akan tetapi semboyan ini belum mencerminkan kesamaan politik yang dimaksudkan oleh pemerintah yang demokratis.

Pada negara yang sedang berkembang masyarakat kota/kelurahan merupakan mayoritas hunian bagi masyarakat dari desa atau daerah lain yang bermigrasi. Huntington (2003:513) di hampir semua negara berkembang, mayoritas penduduk biasanya merupakan mayoritas terbesar bermukim di wilayah pedesaan dan bekerja di sektor pertanian. Selanjutnya, di negara-negara seperti ini, jumlah penduduk perkotaan bertambah jauh lebih cepat dibandingkan dengan penduduk pedesaan yang sebagian besar diakibatkan adanya migrasi orang-orang dari desa ke kota.

Kota/kelurahan seterusnya menjadi pusat oposisi yang berlanjut terus terhadap sistem politik. Stabilitas pemerintahan dengan sendirinya sangat bergantung atas dukungan masyarakat pedesaan yang dapat dikerahkannya. Semakin besarnya arus informasi yang cepat sampai kepada masyarakat menjadikan kota/kelurahan sebagai pusat ketersediaan informasi sebelum informasi tersebut sampai di desa.

Pada negara berkembang kota tidak hanya merupakan pusat instabilitas; tetapi juga sebagai sentral oposisi terhadap pemerintah. Jika pemerintah hanya mendapat dukungan dan stabilitas dalam ukuran kecil, ia membutuhkan dukungam luas dari masyarakat pedesaan, jika tidak ada yang berhasil menarik dukungan dan simpati masyarakat pedesaan, stabilitas tidak akan pernah tercapai. Akhirnya, di negara berkembang penganut sistem politik demokratis akan tercipta pola pemilihan yang berbeda antara kota dan desa.

Kesenjangan ini menjadi salah satu alasan penulis untuk menganalisis terkait dengan perbandingan partisipasi politik dari instansi pemerintah dengan tingkatan terendah ini, adapun Kedauannya yaitu Pekon (Desa) dan Kelurahan (Kota). Berdasarkan karakteristik diantara keduanya mempunyai perbedaan diantaranya dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, Pendapatan masyarakat, jenis pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya.

F. Kerangka Pikir Penelitian

Dalam negara demokrasi, partisipasi politik merupakan salah satu alasan dan tolak ukur tentang bagaimana proses demokrasi itu berjalan. Berjalan dengan seiringnya waktu dan kesempatan, partisipasi politik menjadi masalah yang krusial khususnya bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan penelitian tentang tingkat partisipasi politik sebelumnya dari berbagai daerah di Indonesia, yang menjadi dominan penyebab munculnya masalah partisipasi adalah kepercayaan masyarakat terhadap politik dan yang menjalankan kekuasaan semakin hari semakin memudar, terlebih lagi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme semakin marak terjadi.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis akan melihat faktor rendahnya partisipasi masyarakat Pekon Pardasuka dan Kelurahan Pringsewu Timur dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Fatah dalam Sanit (2011:60) yang meliputi beberapa faktor yaitu :

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri sendiri mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Ada dua yang masuk pada kategori ini yaitu aspek teknis dan pekerjaan.

1. Teknis

Faktor teknis yang penulis maksud adalah adanya kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih. Seperti pada saat hari pencoblosan pemilih sedang sakit, pemilih sedang ada kegiatan yang lain serta berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Kondisi itulah yang secara teknis membuat pemilih tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

2. Pekerjaan

Faktor pekerjaan pemilih memiliki kontribusi terhadap jumlah orang yang tidak memilih. Faktor pekerjaan di sektor informal, dimana penghasilannya sangat terkait dengan intensitasnya bekerja, banyak dari sektor informal yang baru mendapatkan penghasilan ketika mereka bekerja, tidak bekerja berarti tidak ada penghasilan. Seperti tukang ojek, buruh harian, nelayan, petani harian, kemudian ada pekerjaan masyarakat yang mengharuskan mereka untuk meninggalkan tempat tinggalnya seperti para pelaut, penggali tambang. Kondisi

seperti membuat mereka harus tidak memilih, karena faktor lokasi mereka bekerja yang jauh dari TPS.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal faktor yang berasal dari luar yang mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Ada tiga yang masuk pada kategori ini menurut pemilih yaitu aspek administratif, sosialisasi dan politik.

1. Administratif

Faktor administratif adalah faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut dalam pemilihan.

2. Sosialisasi

Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini disebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur, pemilu legislatif dan pemilu presiden hal ini belum dimasukkan pemilihan yang lebih kecil seperti RT/ RW.

3. Politik

Faktor Politik erat kaitannya dengan ideologi partai politik, ketidaksepehaman dengan sebuah ideologi dapat menjadi salah satu pengaruh pemilih untuk tidak menyalurkan suaranya dalam pilkada. Ideologi merupakan landasan yang mendasari sebuah partai politik dalam menjalankan fungsinya. Tanpa ideologi yang jelas tidak mungkin sebuah organisasi seperti partai politik mampu menjalankan fungsinya bahkan tidak mungkin berdiri.

Nazaruddin, Hamid dan Toto dalam Efriza (2012:104) mengemukakan bahwa tinggi rendahnya partisipasi politik di negara-negara berkembang sangat ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu:

1. Tingkat pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi tingkat kesadaran politiknya pun semakin tinggi pula. Jadi dalam masyarakat yang mempunyai kesadaran politik tinggi, yang disebabkan oleh tingginya kualitas pendidikan atau tersebarnya pendidikan di dalam masyarakat, maka partisipasi politik akan tinggi.

2. Tingkat Kehidupan ekonomi

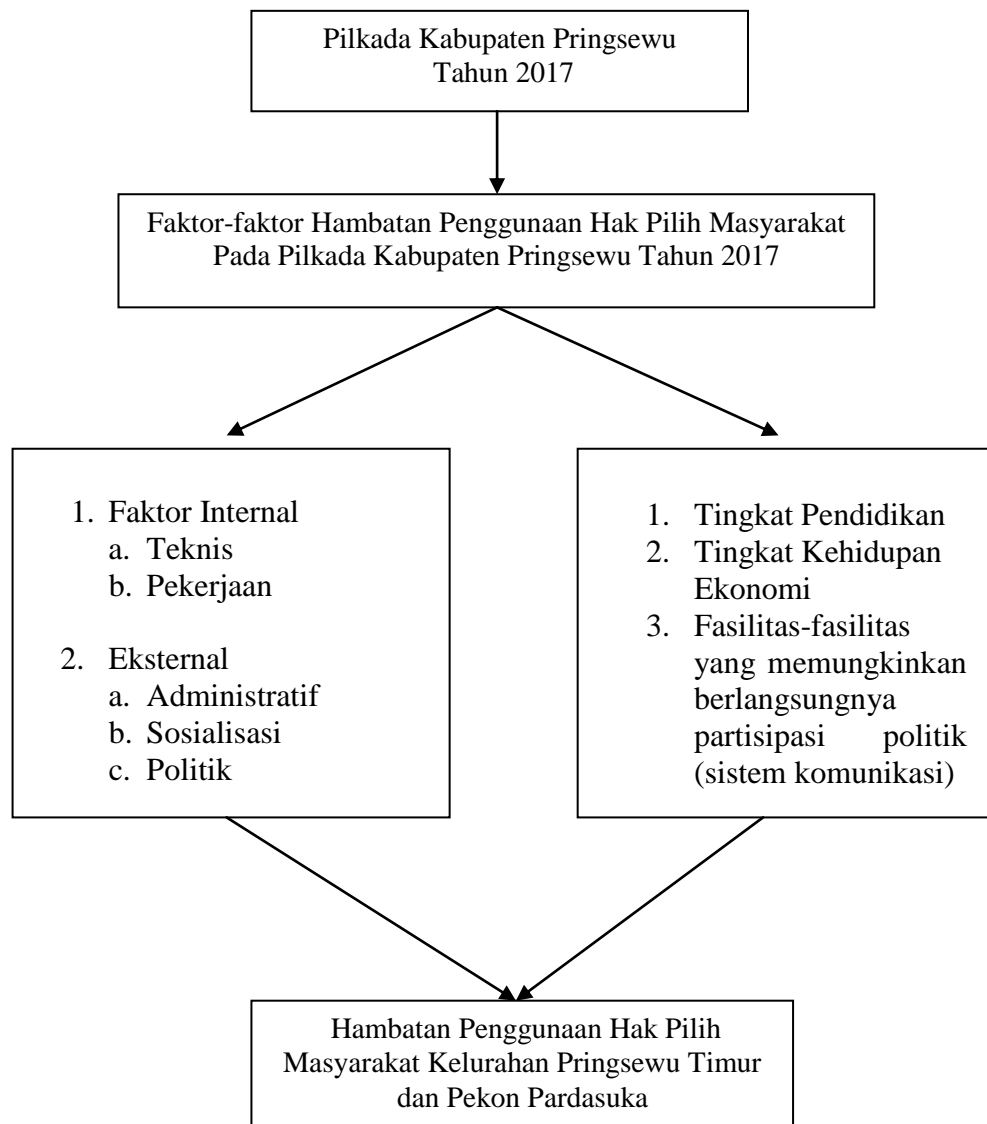
Masyarakat yang mempunyai tingkat kehidupan ekonomi yang rendah, maka tingkat partisipasinya pun akan rendah. Dengan demikian akan sangat minim bagi masyarakat yang mempunyai tingkat ekonomi rendah untuk melakukan kegiatan-kegiatan diluar bidang ekonomi termasuk partisipasi politik

3. Fasilitas-fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya partisipasi politik (sistem komunikasi)

Kesempatan yang mungkin diperoleh dalam masyarakat-masyarakat yang mempunyai sistem komunikasi yang baik tidak akan diperoleh oleh negara berkembang. Sebab dalam negara berkembang komunikasi lebih banyak bersifat dari atas ke bawah jarang komunikasi dari bawah ke atas terjadi.

Berdasarkan teori yang akan digunakan tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari Eep Saefulloh Fattah dan Nazaruddin, Hamid, Toto karena penulis menganggap bahwa teori ini telah mencakup semua faktor penyebab tidak memilih yang membagi atas dua faktor, yaitu faktor internal, dimana perilaku tidak memilih yang berasal dari diri sendiri seperti teknis atau tidak berada pada lokasi saat pemilihan serta sedang bekerja saat pemilihan. Selanjutnya faktor eksternal, dimana penyebab tidak memilih terjadi diluar diri sendiri seperti masalah administratif, sosialisasi dan alasan politik. Selain itu, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kehidupan Politik, Fasilitas-fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya partisipasi politik (sistem komunikasi). Untuk lebih memahami penelitian ini maka akan disajikan bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

Setelah menyusun kerangka pikir, penulis akan menentukan metode dalam penelitian ini. Tujuan penelitian bab ini adalah untuk menentukan cara penulis dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan yang ada. Pembahasan dimulai dengan menentukan tipe penelitian, fokus penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan teknik penarikan keabsahan data. Semua pembahasan tersebut didukung dengan referensi-referensi termutakhir terkait metode penelitian dalam politik dan pemerintahan.

Raco (2010:5) secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik secara teoritis maupun secara praktis. Sekaran dalam Raco (2010:5) penelitian adalah suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah. Intinya penelitian adalah pemberian masukan yang dibutuhkan oleh pengambil kebijakan untuk membuat sebuah keputusan.

A. Tipe Penelitian

Catherine dalam Sarwono (2006:193) Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Dalam menganalisis Penggunaan hak pilih masyarakat pada Pilkada Pringsewu tahun 2017, maka dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang artinya melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema klasifikasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Tujuan penelitian pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Tujuan ini ditulis dengan istilah-istilah “teknis” penelitian yang bersumber dari bahasa penelitian kualitatif. Schwandt dalam Creswell (2010:150) Tujuan penelitian kualitatif menyatakan rancangan penelitian yang dipilih.

Penulis tertarik memakai pendekatan kualitatif karena memiliki lima keutamaan. Keutamaan dalam penelitian penting menurut Yin (2011:7) Pertama, mempelajari kehidupan masyarakat secara realita. Kedua, mewakili pandangan dan perspektif masyarakat. Ketiga, meliputi kondisi kontekstual. Keempat, berkontribusi wawasan ke dalam konsep yang dapat membantu untuk menjelaskan kondisi aktual dan Kelima, berusaha untuk menggunakan banyak sumber.

Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif memahami realitas sosial sesungguhnya adalah bersifat aktual bergantung pada makna dan interpretasi yang diberikan oleh manusia yang memandangnya. Oleh karenanya, melalui desain yang sedemikian diperoleh penjelasan dan gambaran/deskripsi atas analisis hambatan penggunaan hak pilih pada Pilkada Kabupaten Pringsewu tahun 2017.

B. Fokus Penelitian

Santana (2007:46) Fokus penelitian yaitu membahas berbagai data yang telah terkumpul ke dalam kode-kode, ataupun tanda-tanda. Fokus penelitian merupakan batasan masalah yang akan diangkat. Dalam penelitian kualitatif, masalah diistilahkan dengan fokus penelitian yang kemudian diturunkan menjadi pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, fokus penelitian perlu ditetapkan guna membatasi penelitian dan berfungsi pula untuk memenuhi suatu informasi yang diperoleh di lapangan. Fokus penelitian kali ini mengenai faktor-faktor hambatan penggunaan hak pilih masyarakat pada Pilkada Kabupaten Pringsewu tahun 2017 yang akan ditinjau dari kriteria sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Teknis

Saat hari pencoblosan pemilih sedang sakit, pemilih sedang ada kegiatan yang lain serta berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih.

b. Pekerjaan

Saat hari pemilihan pemilih sedang bekerja sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Selain itu, kondisi seperti membuat mereka harus tidak memilih, karena faktor lokasi mereka bekerja yang jauh dari TPS.

2. Faktor Eksternal

a. Administratif

Masyarakat tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP).

b. Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi oleh penyelenggara pemilu kepada masyarakat yang mengakibatkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang pemilu/pilkada yang akan dilaksanakan.

c. Politik

Lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta tidak adanya kesepahaman terhadap ideologi seorang calon atau lembaga politik.

Selanjutnya ditinjau pula berdasarkan kriteria berikut ini :

1. Tingkat pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran politiknya.

2. Tingkat Kehidupan ekonomi

Masyarakat yang mempunyai tingkat kehidupan ekonomi yang rendah, maka tingkat partisipasinya pun akan rendah.

3. Fasilitas-fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya partisipasi politik (sistem komunikasi)

Kesempatan yang mungkin diperoleh dalam masyarakat-masyarakat yang mempunyai sistem komunikasi yang baik tidak akan diperoleh oleh negara berkembang. Sebab dalam negara berkembang komunikasi lebih banyak bersifat dari atas ke bawah jarang komunikasi dari bawah ke atas terjadi.

Berdasarkan teori yang digunakan tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori sebagai bahan analisis yaitu teori yang dikemukakan oleh Eep Saefulloh Fattah Serta Naaruddin, Hamid, dan Toto karena penulis menganggap bahwa teori ini telah mencakup semua faktor hambatan tidak memilih yang dibagi atas beberapa faktor, yaitu faktor internal, dimana perilaku tidak memilih yang berasal dari diri sendiri seperti teknis atau tidak berada pada lokasi saat pemilihan serta sedang bekerja saat pemilihan, Selanjutnya faktor eksternal, dimana penyebab tidak memilih terjadi diluar diri sendiri seperti masalah administratif, sosialisasi, dan alasan politik. Selain itu pula terdapat terdapat faktor pendidikan, tingkat kehidupan ekonomi dan sistem komunikasi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Kelurahan Pringsewu Timur Kabupaten Pringsewu dan Pekon Pardasuka. Penulis memilih Kelurahan Pringsewu Timur dan Pekon Pardasuka karena kedua daerah tersebut merupakan representasi daerah pedesaan dan perkotaan dengan tingkat partisipasi terendah baik di desa maupun di kelurahan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2017, dimana kedua daerah tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda baik pada aspek masyarakat maupun fasilitas publik. Alasan tersebut mendorong penulis untuk memfokuskan penelitian ini pada hambatan penggunaan hak pilih masyarakat di Pekon Pardasuka dan Kelurahan Pringsewu Timur.

D. Informan

Informan dalam penelitian ini meliputi beberapa masyarakat yang Menggunakan dan tidak menggunakan hak pilihnya, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), tokoh masyarakat, aparatur Kelurahan dan Pekon serta Ketua KPU Kabupaten Pringsewu. Berikut merupakan daftar informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1 Daftar Informan

| No | Informan | Jumlah Informan | |
|----|--|---------------------------|-----------------|
| | | Kelurahan Pringsewu Timur | Pekon Pardasuka |
| 1 | Masyarakat Tidak Memilih | 5 | 5 |
| 2 | Masyarakat Memilih | 5 | 3 |
| 3 | Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) | 1 | 1 |
| 4 | Tokoh Masyarakat | 2 | 2 |
| 5 | Aparatur Kelurahan/Pekon | 1 | 1 |
| 5 | Ketua KPU Kabupaten Pringsewu | 1 | |
| | Jumlah | 28 | |

Berdasarkan tabel daftar informan diatas bahwa informan dalam penelitian ini adalah 5 Informan dengan jumlah seluruhnya adalah 28 jiwa. Peneliti mengolah data berdasarkan wawancara langsung dengan informan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil tentang hambatan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Khususnya di Kelurahan Pringsewu Timur dan Pekon Pardasuka.

E. Jenis Data

Neuman (2014:477) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan gambar-gambar yang didapatkan dari dokumen-dokumen, pengamatan dan tulisan-tulisan, gambar-gambar atau foto. Morse dalam Flick (2014:166) sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini meliputi beberapa masyarakat yang Menggunakan dan tidak menggunakan hak pilihnya, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), tokoh masyarakat, aparatur Kelurahan dan Pekon, serta Ketua KPU Kabupaten Pringsewu.

Data sekunder pada penelitian ini adalah Form C-1 pada Pilkada Kabupaten Pringsewu 2017, berita oleh media, serta profil wilayah Kelurahan Pringsewu Timur dan Pekon Pardasuka.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh berbagai data tersebut, maka dibutuhkan suatu teknik dalam mengumpulkannya. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang penting dalam penelitian, namun dalam sebuah penelitian tidaklah cukup hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi juga harus menganalisisnya. Dalam pendekatan kualitatif untuk melakukan sebuah penelitian, analisis dapat dimulai sementara dengan mengumpulkan data terlebih dahulu, namun analisis tersebut cenderung tentatif dan tidak lengkap, karena data yang terkumpul nantinya dipakai sebagai informasi yang valid dan representatif untuk menjawab masalah dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang telah diaplikasikan meliputi :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, kemudian pewawancara mencatat atau merekam jawaban-jawaban yang

dikemukakan oleh informan. Penulis menyusun panduan wawancara berdasarkan fokus masalah penelitian untuk dijadikan materi dalam wawancara agar menjadi terarah dan tidak menyimpang. Bryman (2012:469) Istilah “wawancara kualitatif” ini sering digunakan dalam berbagai jenis wawancara yang digunakan dalam wawancara kualitatif, istilah ini digunakan sebagai cara singkat mengelompokkan berbagai bentuk wawancara penelitian kualitatif.

Halperin dan Heath (2012:253) Berbagai cara dalam pengumpulan data wawancara, antara lain data hasil wawancara dapat dikumpulkan dengan melakukan wawancara secara langsung, telepon, atau wawancara online, atau dengan mengadakan sesi diskusi dalam kelompok. Ada dua jenis wawancara dalam penelitian kualitatif, yaitu wawancara terstruktur dan semi-terstruktur. Penulis menyusun panduan wawancara berdasarkan fokus masalah penelitian untuk dijadikan materi dalam wawancara agar menjadi terarah dan tidak menyimpang. Penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, artinya proses wawancara lebih terbuka dengan meminta pendapat atau gagasan narasumber terkait hambatan penggunaan hak pilih masyarakat, sehingga Penulis dapat menemukan data yang lebih mendalam dengan mencatat dan mendengarkan keterangan dari informan.

2. Dokumentasi

Silaen dan Widiyono (2013:163) dokumentasi merupakan peninggalan tertulis mengenai data berbagai kegiatan atau kejadian yang dari segi waktu yang relatif belum terlalu lama. Sumber data pada penelitian ini

yaitu Surat Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu nomor 13/kpts/KPU-Kab-008.680701/TAHUN2017 (form C-1) tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu tahun 2017.

G. Teknik Pengolahan Data

Neuman (2007:328) Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang terdiri dari beberapa langkah yaitu: reduksi data, display data. Data kualitatif yang berupa data dalam bentuk foto, kata-kata, tindakan penulis dan peristiwa di kehidupan sosial. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.

1. Reduksi Data

Fuad dkk (2014:16) reduksi data dimaknai sebagai proses memilah dan memilih, menyederhanakan data yang terkait dengan kepentingan penelitian saja, abstraksi dan transformasi data-data kasar dari *field notes* (catatan lapangan). Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal yang dianggap penting oleh penulis, reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklasifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti. Penulis mengumpulkan data mengenai faktor-faktor hambatan penggunaan hak pilih masyarakat pada Pilkada Pringsewu tahun 2017.

2. Display Data

Display data adalah sekumpulan informasi yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas, terperinci, dan menyeluruh akan lebih memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Hasil reduksi data disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi deskriptif.

Fuad dkk (2014:17) bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa uraian singkat, bagan, hubungan kausal antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun yang paling sering dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini penulis penyajian data yang diberikan yaitu dalam bentuk uraian singkat disertai bagan dan bersifat naratif.

Penulis melakukan pengumpulan data yang telah melalui reduksi untuk menggambar kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Catatan-catatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan penulis pada penyajian data adalah data yang didapat disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu.

H. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan salah satu teknik yang penting dalam menentukan validitas dan realibilitas data yang diperoleh dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi.

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Menurut Moleong (2006:29). Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 48 tahun 2008 tanggal 26 November 2008 dan diresmikan pada tanggal 3 April 2009 oleh Menteri Dalam Negeri. Secara geografis Kabupaten Pringsewu terletak diantara 104045'25" – 10508'42" Bujur Timur (BT) dan 508'10"-5034'27" Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah dimiliki sekitar 625 km² atau 62.500 Ha.

Secara administratif Kabupaten Pringsewu berbatasan dengan 4 wilayah kabupaten sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Waylima dan Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulok dan Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung dan Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus.

Kabupaten Pringsewu terdiri dari 9 (sembilan) wilayah kecamatan, yaitu : 1. Kecamatan Pardasuka, 2. Kecamatan Ambarawa, 3. Kecamatan Pagelaran, 4. Kecamatan Pagelaran Utara, 5. Kecamatan Pringsewu, 6. Kecamatan Gading Rejo, 7. Kecamatan Sukoharjo, 8. Kecamatan Banyumas, dan 9. Kecamatan Adiluwih. Sekitar 41,79% wilayah Kabupaten Pringsewu merupakan areal datar (0-8%) yang tersebar di Kecamatan Pringsewu, Ambarawa, Gadingrejo dan Sukoharjo. Untuk lereng berombak (8-15%) memiliki sebaran luasan sekitar 19,09% yang dominan terdapat di Kecamatan Adiluwih. Sementara kelerengan yang terjal (>25%) memiliki sebaran luasan sekitar 21,49% terdapat di Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pardasuka.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Pringsewu berada pada ketinggian 100–200 meter di atas permukaan laut, hal itu dapat dilihat dari porsi luasan yang merupakan luasan terbesar yaitu 40.555,25 Ha atau sebesar 64,88% dari total wilayah Kabupaten Pringsewu. Wilayah dengan ketinggian 100–200 meter sebagian besar tersebar di wilayah Kecamatan Pagelaran. Sedangkan kelas ketinggian lahan tertinggi > 400 meter di atas permukaan laut dengan porsi luasan terkecil atau sebesar 5,99% terdapat di Kecamatan Pardasuka dengan luasan sebesar 2.640,40 Ha atau 27,86% dari total luas wilayahnya dan Kecamatan Pagelaran dengan luasan sebesar 1.106,72 Ha atau 6,40% dari total luas wilayahnya.

B. Kelurahan Pringsewu Timur

1. Sejarah

Kelurahan Pringsewu Timur merupakan salah satu Wilayah Kelurahan yang ada di Kecamatan Pringsewu. Terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus No. 02 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kelurahan Pringsewu Timur, Pringsewu Selatan, Pringsewu Barat, Pringsewu Utara, dan Pajaresuk. Terbitnya Perda tersebut, secara resmi Kelurahan Pringsewu Timur telah terbentuk yang dilakukan oleh Bupati Tanggamus pada tanggal 31 Agustus 2002 bersamaan dengan Pelantikan Lurah Pringsewu Timur.

Tabel. 4.1 Nama-nama Lurah

| No | Nama | Periode Menjabat | Ket |
|----|--------------------------------|------------------------------|-------|
| 1 | Drs. Nang Abidin Hasan | Tahun 2003 - 2007 | Lurah |
| 2 | Waras Suparno | Tahun 2007 - 2008 | Lurah |
| 3 | Roshastini, S. Sos | Tahun 2008 - 2009 | Lurah |
| 4 | Sukarya | Tahun 2009 - 2010 | Lurah |
| 5 | Jiono. S | Tahun 2011 - 2016 | Lurah |
| 6 | Umar Panca Krida Wardana, S.E. | Tahun 2017 – Sampai Sekarang | Lurah |

(sumber: diolah dari profil Kelurahan Pringsewu Tahun 2016)

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti pembentukan Kelurahan Pringsewu Timur, maka Lurah bersama segenap komponen masyarakat bermusyawarah membentuk lingkungan dan RT/RW yang berjumlah 5 lingkungan 27 RT 3 kaum. Pada tingkat lingkungan pada bulan Januari 2003 telah dibentuk PKK masing-masing lingkungan. Kemudian dibentuk PKK tingkat Kelurahan yang diupayakan bersama lembaga-lembaga sosial yang ada dapat menjadi mitra kerja Kelurahan.

Setelah terlengkapinya Struktur Pemerintahan Kelurahan, Struktur Organisasi Lingkungan. Maka aktivitas Sosial masyarakat di Kelurahan Pringsewu Timur secara kelembagaan senantiasa di musyawarahkan, demikian juga rencana-rencana pembangunan dan program yang bersifat sosial kemasyarakatan, sistem pelayanan pemerintahan, pelayanan umum dan Pembangunan di rencanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

2. Kondisi Geografis

Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu mempunyai luas wilayah \pm 166/200 Ha, hujan 2.500 mm, suhu 30derajat celcius, ketinggian 500 mdpl. Terdapat 1833 KRT, 1861 KK, Jiwa terdiri dari Laki laki 3299 jiwa dan perempuan 3097 jiwa. Kelurahan Pringsewu Timur berada pada ketinggian 95-113,75 m dari permukaan laut (dpl). Suhu udara $24^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$ dengan curah hujan 2.300-3000 mm . Sebagian wilayahnya berupa dataran, dengan hamparan sawah, pertokoan, penginapan/ kosan/ hotel, sekolah yang lengkap, kuliner dan industri rumah tangga. Hal ini menjadikan Kelurahan Pringsewu Timur sebagai daerah perkotaan.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|----|-----------------|-----------|
| 1 | Laki - Laki | 3299 Jiwa |
| 2 | Perempuan | 3097 Jiwa |
| 3 | Kepala Keluarga | 1861 KK |

(sumber: diolah dari profil Kelurahan Pringsewu Tahun 2016)

Batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pringsewu Utara.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Margakaya.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pringsewu Selatan.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Sidoharjo.

Jarak/Orbitas dari Kantor Kelurahan Pringsewu Timur Ke Kantor Kecamatan Pringsewu \pm 1 km, yang mana Kantor Kecamatan Pringsewu terletak di Pekon Sidoharjo. Sedangkan jarak dari Kelurahan ke Ibu Kota Kabupaten Pringsewu Propinsi dan Pusat Ibu Kota Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3 Orbitas dari Kelurahan ke Daerah lain

| NO | Ibu Kota | ke Ibu Kota Kecamatan |
|----|-----------|-----------------------|
| 1 | Kecamatan | 1,0 Km |
| 2 | Kabupaten | 7 ,0Km |
| 3 | Propinsi | 65,0 Km |
| 4 | Negara RI | 258,0 Km |

(sumber: diolah dari profil Kelurahan Pringsewu Tahun 2016)

Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu yang sampai saat ini hampir memasuki usia ke 15 tahun. Dengan segala keterbatasan fasilitas baik infrastruktur maupun sarana lainnya, senantiasa berusaha baik melalui kegiatan gotong royong atau kegiatan lainnya mensejajarkan diri dengan Kelurahan dan Pekon lain yang ada di Kecamatan Pringsewu. Sehingga peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya dapat diwujudkan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka Kelurahan Pringsewu Timur mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Pringsewu yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kelurahan Pringsewu Timur Untuk Bersenyum Manis (Bersih, Sehat, Nyaman, Unggul, Maju, Mandiri, Agamis)”

Berdasarkan visi tersebut maka Kelurahan Pringsewu Timur menetapkan misi sebagai berikut:

1. Memelihara Kebersihan Lingkungan bersih sehat asri
2. Mempercepat Perbaikan Jalan, masyarakat yang tertib dan aman
3. Menjadikan Pringsewu Timur sebagai kota yang menarik bagi para investor sehingga dapat membuka lapangan kerja.
4. Mengarahkan masyarakat pada pola pemikiran dan mental menuju kearah yang lebih baik.

Tabel 4.4 Pengalokasian Lahan

| No | Jenis Alokasi Lahan | Luas |
|----|---------------------|---------------|
| 1 | Jalan | 60 Km |
| 2 | Sawah dan Ladang | 50 Ha |
| 3 | Bangunan Umum | 20 Ha |
| 4 | Pemukiman/Perumahan | 150 Ha |
| 5 | Pemakaman | 123 Ha |
| 6 | Lain-lain | 124,65 Ha |
| | Jumlah | 465 Ha, 60 Km |

(sumber: diolah dari profil Kelurahan Pringsewu Tahun 2016)

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan pengalokasian lahan di Kelurahan Pringsewu Timur yang paling luas adalah lahan pemukiman/perumahan dengan luas 150 Ha. Sedangkan luas lahan paling sedikit adalah lahan bangunan umum dengan 20 Ha. Terlihat pula lahan persawahan dan ladang yang hanya memiliki luas 50 Ha. Jika dilihat dari

ketersediaan lokasi persawahan dan kebun tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian tidak terlalu dominan sebagai mata pencarian utama masyarakat di Kelurahan Pringsewu Timur.

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah Penduduk |
|--------|--|-----------------|
| 1 | Sekolah Dasar (SD) | 1.128 |
| 2 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 1.042 |
| 3 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 2.054 |
| 4 | Diploma (D1-D3) | 259 |
| 5 | Sarjana, Magister, Doktoral (S1,S2,S3) | 344 |
| 6 | Tidak Tamat SD | 720 |
| 7 | Penduduk Buta Huruf | 51 |
| Jumlah | | 5.598 |

(sumber: diolah dari profil Kelurahan Pringsewu Tahun 2016)

Sejak tahun 2007 dibentuknya Kelurahan Pringsewu Timur telah berganti beberapa kali kepemimpinan lurah sampai pada saat ini. Berikut merupakan struktur organisasi Kelurahan Pringsewu diantaranya :

- a. Lurah : Umar Panca Krida
Wardana, S.E. MM
- b. Sekretaris Lurah : Min Helina, SE., MM.
- c. Kepala Seksi Pemerintahan : Robaiti, SE.
- d. Kepala seksi Pemberdayaan : Angga Dewantara
- e. Kepala seksi Ketantraman dan Ketertiban : Sailendra Lubis, SE.

Tabel 4.6 Rukun Tetangga (RT)

| No | RT | Lingkungan I | Lingkungan II | Lingkungan III | Lingkungan IV | Lingkungan V |
|----|-----|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1 | 001 | Suprianto. AM | Yasin Mustakim | Suyatno | Sunarno | Surani |
| 2 | 002 | Joko Widodo | Tata | Fadelan | Maryono | Suherman |
| 3 | 003 | Sukisno | Agus Dwinanto | Edi Hariyanto | Hendri Susanto | Marwanto |
| 4 | 004 | | Hariyanto | Samsuri | Irfan Sumantri | Haryanto |
| 5 | 005 | | | Panji | Salmin | |
| 6 | 006 | | | Supangat | Surtyadi | |
| 7 | 007 | | | Tahrudi | Turmanto | |
| 8 | 008 | | | | Sugianto | |
| 9 | 009 | | | | Yatiman | |

(sumber: diolah dari profil Kelurahan Pringsewu Tahun 2016)

C. Pekon Pardasuka

1. Sejarah

Pekon Pardasuka merupakan Pekon Tuha dibelahan Selatan Kabupaten Pringsewu dimana Pekon. Pardasuka menurut penelusuran sejarah pekon pardasuka berdiri pada tahun 1887 yang merupakan rumpun keturunan yang bersala dari *Putih Pampangan Kemandakan* dan dimana datang salah satu keturunannya membuka pemukiman tepatnya *Pakhdasuka* (*Pakhda* = Sama-Sama/ *Suka* = Senang) yang saat ini disebut *Pekon Pardasuka* yang pemekonannya dialiri sungai *Way Mincang*. Pemekonan ini berdiri dan merupakan kumpulan adat *Sai Batin Marga Way Lima*.

Kehadatan dipimpin seorang Kepala adat *Batin Sekanda* sekaligus sebagai kepala Pemerintahan pertama yang dikala itu disebut *Pesikhah*. Pada saat ini masih dalam lingkup Desa Kedondong Kecamatan Kedondong

Kabupaten Pesawaran dan pada tahun 1971 Pemekaran Kecamatan Pardasuka Kabupaten Lampung Selatan dan dengan ibu kota Kecamatan Pekon Pardasuka dan pada tahun 1997. Pemekaran Kabupaten Tanggamus dan pada tanggal 02 April 2008 Pekon Pardasuka Kecamatan Pardasuka menjadi bagian Kabupaten Pringsewu.

Tabel 4.7 Nama-nama Kepala Pekon Pardasuka

| No | Nama Kepala Pekon | Periode Menjabat | KET |
|----|---------------------|-------------------|-----|
| 1 | Batin Sekanda | Tahun 1887 - 1928 | |
| 2 | Dalom Bangsa Khatu | Tahun 1928 - 1935 | |
| 3 | Gunawan (Basyumi) | Tahun 1935 - 1953 | |
| 4 | Suhada Rauf | Tahun 1953 - 1970 | |
| 5 | Gafarnur | Tahun 1970 -1971 | |
| 6 | Saudi | Tahun 1971 - 1978 | |
| 7 | Sazeli Gunawan | Tahun 1978 - 1988 | |
| 8 | Mahmuddin Hasan | Tahun 1988 - 1996 | |
| 9 | Basuan | Tahun 1996 - 1998 | Pjs |
| 10 | Yurhamuni Hi Bahri | Tahun 1998 - 2006 | |
| 11 | Firzamzi | Tahun 2006 - 2007 | Pjs |
| 12 | Aizi Hi Ali | Tahun 2007 - 2012 | |
| 13 | Yurhamuni Hi Bahri | Tahun 2012 - 2017 | |

(sumber: diolah dari profil pekon pardasuka Tahun 2016)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pekon pardasuka telah beberapa kali berganti kepala pekon yaitu 13 kali terhitung sejak tahun 1887 sampai dengan sekarang. Kondisi masyarakat yang plural dan hidup secara berdampingan memberikan semua masyarakat kesempatan untuk menjadi pemimpin wilayah pekon Pardasuka atau yang sering disebut dengan Kepala Pekon. Sampai saat ini kepemimpinan di Pekon pardasuka di ampu oleh Yurhamuni Hi Bahri sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

2. Kondisi Geografis

Pekon Pardasuka memiliki luas wilayah 588 Ha, terletak di dataran lereng/puncak dengan ketinggian tanah yaitu 1500 Mdpl. Pekon pardasuka memiliki curah hujan sedang dan keadaan itu dimanfaatkan oleh sebagian masyarakatnya untuk bertani dan bercocok tanam termasuk diantaranya adalah persawahan dan perkebunan. Masyarakat Pekon Pardasuka berjumlah 5.459 jiwa yang terdiri dari 2.646 berjenis kelamin laki-laki, 2.813 berjenis kelamin perempuan, dan terdapat 1.334 Kepala Keluarga (kk). Berikut merupakan batas-batas wilayah pekon pardasuka :

- a. Batas Wilayah Pekon Pardasuka
- b. Sebelah Utara Berbatasan dengan Pekon Wargo mulyo
- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Pekon Pardasuka Selatan
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Pekon Tanjung rusia,
- e. Sebelah Timur Berbatasan dengan Pekon Pardasuka timur.

Orbitasi Pekon Pardasuka sebagai berikut :

Tabel. 4.8 Orbitas dari Pekon ke Daerah lain

| NO | Ke Ibu Kota | Jarak |
|----|-------------|--------|
| 1 | Kecamatan | 0,5 Km |
| 2 | Kabupaten | 20 Km |

(sumber: diolah dari profil pekon pardasuka Tahun 2016)

Berdasarkan tabel diatas menunjkan jarak orbitas Pekon Pardasuka ke wilayah pusat pemerintahan berdasarkan kecamatan yaitu 0,5 Km. Sedangkan berdasarkan Kabupaten yaitu sejauh 20 Km. Terlihat bahwa Pekon Pardasuka merupakan wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan

Kabupaten secara tidak langsung waktu tempuh yang diperlukan juga cukup lama.

Tabel 4.9 Pengalokasian lahan

| No | Jenis Alokasi Lahan | Luas |
|--------|---------------------|--------|
| 1 | Bangunan Umum | 5 Ha |
| 2 | Jalan | 12 Ha |
| 3 | Pemukiman/Perumahan | 275 Ha |
| 4 | Pertanian | 290 Ha |
| 5 | Lain-lain | 6 Ha |
| Jumlah | | 588 Ha |

(sumber: diolah dari profil Kelurahan Pringsewu Tahun 2016)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa luas lahan pertanian di Pekon Pardasuka cukup dominan yaitu dengan luas 290 ha. Jika mengacu pada luas lahan pertanian tersebut menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Pekon Pardasuka banyak memanfaatkan lahan pertanian sebagai mata pencarian atau berprofesi sebagai petani. Jumlah luas lahan pertanian tersebut juga hampir mencapai setengah luas lahan secara keseluruhan di Pekon Pardasuka dengan 612 ha.

Tabel 4.10 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah Penduduk |
|--------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | Sekolah Dasar (SD) | 417 |
| 2 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 211 |
| 3 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 134 |
| 4 | Sarjana | 81 |
| 6 | Putus Sekolah | 26 |
| 7 | Buta Huruf | 11 |
| Jumlah | | 880 |

(sumber: diolah dari profil Pekon Pardasuka Tahun 2016)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata-rata masyarakat di Pekon Pardasuka berada pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah mencapai 417. Selain itu masih terdapat masyarakat yang putus

sekolah dan buta huruf yang mencapai masing-masing yaitu 26 dan 11. Adapun jumlah keseluruhan masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan yaitu 880.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hambatan penggunaan hak pilih masyarakat di Kelurahan Pringsewu Timur dan Pekon Pardasuka pada Pilkada Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 adalah:

1. Faktor Internal

a. Teknis

Faktor teknis karena masyarakat yang tidak berada di lokasi pemilihan dengan alasan yang bersifat pribadi diantaranya sedang bekerja dan melanjutkan sekolah di luar daerah. Waktu libur yang sangat terbatas tidak memungkinkan masyarakat untuk pulang hanya untuk sekedar menggunakan hak pilih.

b. Pekerjaan

Faktor pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat di luar daerah menyebabkan masyarakat tidak pulang dan tidak memilih.

2. Faktor Eksternal

a. Administratif

Adanya pemilih yang tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilih, tidak memiliki identitas kependudukan (KTP), dan mendapatkan TPS yang jauh dari tempat tinggal. Hal ini terjadi karena ketidakakuratan DPT seperti banyaknya masyarakat yang mendapatkan TPS yang jauh dari tempat tinggal. Selain itu, masih terdapat data masyarakat yang telah meninggal dunia dan tidak menjadi warga Kelurahan Pringsewu Timur yang masih terdaftar sebagai DPT.

b. Politik

Kepercayaan masyarakat terhadap seorang pemimpin cukup rendah. Faktor tersebut merupakan salah satu alasan masyarakat Kelurahan Pringsewu Timur untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada. Ketidakpercayaan tersebut memunculkan sikap apatis bahkan sinisme terhadap pemimpin sehingga tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka terdapat beberapa saran agar hambatan penggunaan hak pilih masyarakat pada pilkada dapat di minimalisir dan diatasi khususnya di Kelurahan Pringsewu Timur dan Pekon Pardasuka, yaitu:

1. KPU sebagai penyelenggara Pemilu atau Pilkada sebaiknya meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan *stakeholders* setempat serta meningkatkan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dalam pemutakhiran data pemilih.
2. Masyarakat sebagai pemilih jika berhalangan tetap atau berpindah domisili sebaiknya segera melapor pada KPU dan atau dinas kependudukan setempat, agar DPT bisa segera diperbaharui dan lebih akurat, sehingga tidak memunculkan penyalahgunaan DPT.
3. KPU sebagai penyelenggara pemilu dan partai politik sebagai salah satu peserta pemilu untuk meningkatkan pendidikan politik progresif kepada masyarakat dengan tujuan menambah pemahaman kepada masyarakat bahwa politik tidak hanya menjadi kepentingan elit melainkan kepentingan rakyat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2007. *Perihal Ilmu Politik (Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik)*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- _____. 2009. *Politik dan Perubahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asfar, Muhamad. 2004. *Pemilih dan Perilaku Pemilih*. Surabaya : Pustaka Eureka
- Amal, Ichlasul. 1996. *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Arifin, Anwar. 2014. *Politik Pencitraan Pencitraan Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Bryman, Alan. 2012. *Social Research Methods*. New York: Oxford University Press.
- Budiarjo, Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Chilcote, Ronald H. 2004. *Teori Perbandingan Politik (Penelusuran Paradigma)*. Jakarta : PT. Raja Garafindo Persada
- Creswell, John. W. 2003. *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Lincoln: Sage Publications.
- Cunningham, Frank. 2002. *Theories of Democracy*. London: Routledge.
- Duverger, Maurice. 1998. *Sosiologi Politik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Eccleshall, Robert, dkk. 1996. *Political Ideologies*. London: Routledge.
- Efriza. 2012. *Political Explore*. Bandung: Alfabeta.
- Eriyanto. 2007. *Teknik sampling Analisis Opini Publik*. Yogyakarta : LkiS Pelangi Aksara
- Flick, Uwe dkk. 2014. *A Companion to Qualitative Research*. London: Sage Publications.

- Fuad, Anis & Nugroho, Kandung S. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Halperin, Sandra & Heath, Oliver. 2012. *Political Research: Methods and Practical Skills*. New York: Oxford University Press.
- Huntington, Samuel. P. 2003. *Tertib Politik: Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Irawan, Maksudi Beddy. 2012. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Jurdi, Fatahullah. 2014. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Maria, Dede & Paskarina, Caroline. 2008. *Demokrasi & Politik Desentralisasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Marijan, Kacung. 2011. *Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru)*. Jakarta : Prenada Media Grup.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W Laurence. 2007. *Basic of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson Education Limited.
- _____. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson Education Limited.
- Papasi, J.M. 2010. *Ilmu Politik (Teori dan Praktik)*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Prihatmoko, Joko J. 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP2I Press.
- Raco, J R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*. Cikarang: PT Grasindo.
- Ramage, Douglas E. 2003. *Demokrasi di Indonesia (Sebuah Survei Pemilih Indonesia 2003)*. Jakarta: The Asia Foundation.
- Rush, Michael & Althoff, Phillip. 2011. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Santana, Septiyawan. 2007. *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Sanit, Arbi (Eds). 2011. *Aneka Pandangan Fenomena Politik Golput*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Silaen, Sofar dan Widiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: In Media.
- Sitepu, P. Anthonius. 2012. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Suharizal. 2012. *Pemilukada*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Susanto, Eko Harry. 2013. *Komunikasi Politik: Pesan, Kepemimpinan, dan Khalayak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sy, Pahmi. 2010. *Politik Pencitraan*. Gaung Persada Press. Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2011. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Weimer, David L & Vining, Aidan R. 1992. *Policy Analysis (Concepts and Practice)*. New Jersey: Prentice Hall.
- Yin, Robert K. 2011. *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: Guildford Press.
- Zuhro, Siti. 2009. *Demokrasi Lokal (Perubahan dan Kesenambungan)*. Yogyakarta: Ombak.

Jurnal :

- Arianto, Bismar. 2011. *Analisisn Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu*. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol 1 Nomor 1 2011. Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Damita, Nabilah Ayu, dkk. 2013. *Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2013 di Kabupaten Lumajang*.
- Hartina, Andi. 2014. *Partisipasi Politik Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013 di Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara*.
- Komperensi & Yuserizal. 2013. *Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah*.

Dokumen :

Data Rekapitulasi Pemilih pada Pilkada Kabupaten Pringsewu Tahun 2017.

Form C-1 Pilkada Kabupaten Pringsewu Tahun 2017

Profil Kelurahan Pringsewu Timur dan Pekon Pardasuka